

Ridho Rokamah, S.Ag., M.Sl.

## AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH

Kaidah-Kaidah Mengembangkan  
Hukum Islam

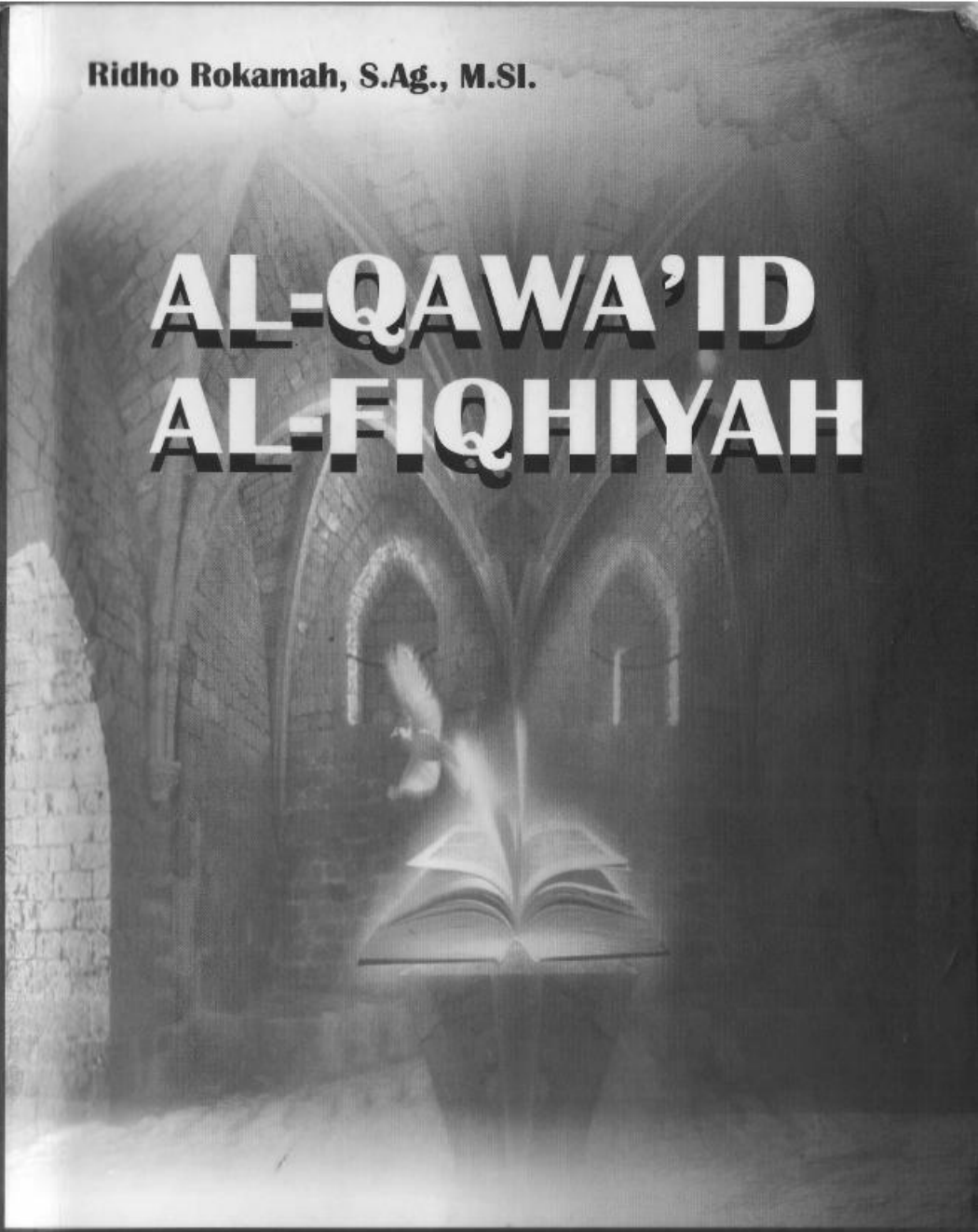
*Al-qawâ'id al-fiqhiyah* merupakan kaidah yang bersifat *al-qawâ'id al-fiqhiyah* yang dirumuskan dari masalah *furu'iyah*. Daya berlakunya *al-qawâ'id al-fiqhiyah* bersifat *aghlabi*, yaitu berlaku untuk sebagian besar *furu'*. Dengan demikian, dalam kaidah tersebut dimungkinkan masih ada beberapa masalah yang dikecualikan atau dengan kata lain masalah-masalah *furu'* yang tidak dapat diberi ketentuan hukum berdasarkan rumusan kaidah tersebut, maka ketentuan hukum tersebut adalah ditentukan secara khusus oleh dalil-dalil yang ada dalam sumber hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus berhati-hati dan cermat di dalam menggunakan *al-qawâ'id al-fiqhiyah* untuk meng-*istinbath*-kan *furu'*. Mengingat *al-qawâ'id al-fiqhiyah* mempunyai peranan yang penting dan manfaat yang besar dalam memberikan petunjuk terhadap hukum-hukum *furu'* terutama ketika kita memerlukan *hujjah* (argumentasi) dan dalil dalam meng-*istinbath*-kan hukum, maka sudah selayaknya setiap orang yang berkecimpung dalam bidang fiqh, juga melengkapi diri dengan *al-qawâ'id al-fiqhiyah*.

StaiN  
PORJOGORO PRESS



Ridho Rokamah, S.Ag., M.Sl.

## AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH



Kaidah-Kaidah Mengembangkan  
Hukum Islam

**Al-Qawâid al-Fiqhîyah**  
Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam

Penulis  
Ridho Rokamah, S.Ag. M.S.I

Penyunting  
Ahmad Faruk

Desain Cover  
Pandu

Tata Letak  
aZZagrafika

Cetakan I, April 2007

Penerbit  
STAIN Ponorogo Press  
Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo 63471  
Telp. (0352) 481277, Fax (0352) 461893,  
Email: stainpopress@yahoo.com  
Indonesia

ISBN: 979-3946-19-9

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku "AL-QAWÂ'ID AL-FIQHÎYAH: Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam" ini dengan tanpa adanya halangan yang berarti.

Buku-buku yang khusus membahas tentang *al-qawâ'id al-fiqhîyah* ini masih sedikit, oleh karena itu penulis berharap buku ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini (karena sistematika pembahasannya telah disesuaikan dengan silaby) atau pihak manapun yang membutuhkannya.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Mun'im (yang telah memberikan banyak masukan, termasuk bahan-bahan referensi), dan A. Faruk (sebagai penyunting buku ini; yang dengan sabar telah membantu memberikan kritik dan saran yang konstruktif), serta semua pihak yang telah membantu memberikan saran, kritik, dan motivasi, sehingga buku ini bisa terselesaikan dengan tanpa adanya halangan yang berarti. Penulis menyadari buku ini masih banyak kelemahan/kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Ponorogo, Januari 2006  
Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGANTAR AL-QAWÂ'ID AL-FIQHÎYAH	5
A. Pengertian, Ruang Lingkup Bahasan dan Perbedaan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> dengan <i>al-Qawâ'id al-Ushûliyyah</i> .	5
1. Pengertian <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> dan Ruang Lingkup pembahasannya	5
2. Pengertian <i>al-Qawâ'id al-Ushûliyyah</i> dan Ruang Lingkupnya	10
3. Perbedaan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> dengan <i>al-Qawâ'id al-Ushûliyyah</i>	13
B. Hubungan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> dengan <i>al-Qawâ'id al-Ushûliyyah</i> , <i>Fiqh</i> dan <i>Ushul Fiqh</i> .	14
1. Hubungan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> dengan <i>al-Qawâ'id al-Ushûliyyah</i>	14
2. Hubungan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> dengan <i>Fiqh</i>	15

3. Hubungan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i> dengan Ushul Fiqh	16
C. Tujuan, Manfaat dan Fungsi <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i>	17
1. Tujuan mempelajari <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i>	17
2. Manfaat mempelajari <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i>	18
3. Fungsi <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i>	18
D. Dasar-dasar Pengambilan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i>	19
E. Sebab-Sebab Pembukuan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i>	21
F. Sejarah Pembentukan dan Pembukuan <i>al-Qawâ'id al-Fiqhîyah</i>	22
1. Periode Pembentukan	22
2. Periode pertumbuhan <i>al-qawâ'id al-fiqhîyah</i> dan perkembangan kitab-kitab yang membahasnya.	24
<b>BAB III PANCA KAIDAH ASASIAH</b>	
BESERTA CABANG-CABANGNYA	29
A. Kaidah Pertama	30
B. Kaidah Kedua	39
C. Kaidah Ketiga	47
D. Kaidah Keempat	52
E. Kaidah Kelima	57
<b>BAB IV EMPAT PULUH KAIDAH-KAIDAH UMUM (KULLÎYAH) YANG DISEPAKATI</b>	
A. Pendahuluan	61
B. Pembahasan Empat Puluh Kaidah-Kaidah <i>Kullîyah</i> (yang disepakati).	61
<b>BAB V KAIDAH-KAIDAH YANG MUKHTALAF</b>	
DAFTAR PUSTAKA	103



## BAB I PENDAHULUAN

**F**iqh Islam merupakan kumpulan dari berbagai macam peraturan hidup yang memberikan ketentuan-ketentuan hukum praktis (*'amali*) terhadap segala segi kehidupan manusia, yang menyangkut hubungan hamba dengan Khaliknya dan hubungan hamba dengan hamba, baik yang menyangkut masalah pribadi/individu, masyarakat, negara dan antar berbagai negara/internasional.

Luasnya wilayah kajian fiqh dan banyaknya masalah-masalah *furû'iyah* yang muncul dalam kehidupan manusia telah memotivasi para mujtahid untuk terus mengkaji fiqh ini dengan memberikan solusi yang praktis dalam menyelesaikan masalah-masalah *furû'iyah* yang sangat banyak jumlahnya. Setelah berusaha dengan cermat dalam mengamati dalil-dalil *kulli* yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka solusi yang ditawarkan adalah kaidah-kaidah *fiqhîyah*, yaitu sebuah kaidah hukum yang sangat mirip dengan "rumus-rumus fiqh", yang berfungsi membantu menyelesaikan masalah-masalah *furû'iyah* yang sangat banyak jumlahnya tersebut.

Kaidah ini mengklasifikasikan masalah-masalah *furû'iyah* menjadi beberapa kelompok, yang tiap-tiap kelompok tersebut adalah kumpulan-kumpulan dari masalah-masalah yang seru-

pa. Sehingga hal ini memudahkan para mujtahid dalam meng-*istinbath*-kan hukum dari berbagai masalah yang ada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

*Al-qawâ'id al-fiqhîyah* merupakan kaidah yang bersifat *kulli* yang dirumuskan dari masalah *furû'iyah*. Daya berlakunya hanya bersifat *aghlabi*, yaitu berlaku untuk sebagian besar *furû'* saja. Dengan demikian, dalam kaidah tersebut dimungkinkan masih ada beberapa masalah yang dikecualikan atau dengan kata lain, masalah-masalah *furû'* yang tidak dapat diberi ketentuan hukum berdasarkan rumusan kaidah tersebut, maka ketentuan hukumnya adalah ditentukan secara khusus oleh dalil-dalil yang ada dalam sumber hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus teliti dan cermat di dalam menggunakan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* untuk meng-*istinbath*-kan *furû'*.

Mengingat *al-qawâ'id al-fiqhîyah* mempunyai peranan yang penting dan manfaat yang besar dalam memberikan petunjuk terhadap hukum-hukum *furû'* bila kita memerlukan *hujjah* (argumentasi) dan dalil serta meng-*istinbath*-kan hikmah, maka sudah selayaknya setiap orang yang berkecimpung dalam bidang fiqh, juga melengkapi diri dengan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* ini. Hal ini senada dengan instruksi khalifah Umar kepada Abû Mûsa al-Asy'ari.

اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور بنظائرها

1 Kaidah-kaidah yang terdapat dalam Islam ini sebenarnya juga di kenal dalam hukum Indonesia dan juga hukum Barat. Di Indonesia istilah yang sering kita dengar adalah "berani berbuat, berani bertanggung jawab", yang maksudnya adalah orang harus berani mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya atas pilihannya sendiri. Istilah ini merupakan kaidah yang dapat mencakup banyak kasus yang sesuai dengan kaidah ini. Misalnya kasus-kasus pencurian, pembunuhan, penghinaan, penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan di Barat, mempunyai istilah kaidah-kaidah khusus yang disebut dengan *legal maxims*. Misalnya dikenal prinsip *ne bis in idem* yang maksudnya adalah seseorang tidak bisa dihukum lagi (dua kali/lebih) untuk sebuah kesalahan yang sama sampai ada bukti-bukti baru yang sah dan meyakinkan. Istilah ini diperoleh dari penjelasan Dr. Abdul Mun'im (dosen senior dalam bidang ini), dalam catatan kuliah *al-qawâ'id al-fiqhîyah* jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

Pelajarilah segala soal-soal yang serupa dan bersamaan, dan *qiyâskanlah* segala urusan kepada hal-hal yang sebanding.<sup>1</sup>

Mengambil inspirasi dari instruksi Khalifah Umar di atas, sebagian ulama menamakan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* dengan *al-Asybâh wa al-nadhâir*, yang maksudnya, *al-qawâ'id al-fiqhîyah* diletakkan di bawah pokok persoalan satu yang sama, yaitu dengan menggunakan analogi atau *qiyâs* dapat diterangkan hukum satu masalah pada masalah-masalah yang sejenis. Berkaitan dengan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* banyak fuqaha yang berkata:

من رعى الأصول كان حقيقاً بالوصول ومن راعى القواعد كان خليقاً  
بإدراك المقاصد

Barang siapa memelihara *ushul*, maka ia akan sampai kepada maksud, dan barang siapa memelihara *qawâ'id* selayaknya ia mencapai tujuan hukum.<sup>2</sup>

Dalam masalah ini Imam Abû Muhammad Izzuddin ibn 'Abd al-Salam menyimpulkan bahwa *al-qawâ'id al-fiqhîyah* merupakan jalan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Sedangkan al-Qarafy dalam *al-Furuq*-nya menulis bahwa seorang faqih tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang kepada *al-qawâ'id al-fiqhîyah*, karena apabila seorang faqih tidak berpegang *al-qawâ'id al-fiqhîyah*, maka hasil ijtihadnya banyak yang bertentangan dan berbeda antara *furû'-furû'* itu.<sup>3</sup> Karena itu, setiap fuqaha' selalu berpegang pada *al-qawâ'id al-fiqhîyah*, sehingga mereka mudah menguasai *furû'-furû'*-nya.

1 Haabi Al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994.), 98.

2 Asjmunî A. Rahman, *Qa'idah-qaidah Fiqh (Qawâ'idul Fiqhîyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 17.

3 Ibid, 18.

## BAB II

### PENGANTAR

### AL-QAWÂ'ID AL-FIQHÎYAH

#### A. Pengertian, Ruang Lingkup Bahasan dan Perbedaan *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dengan *al-Qawâ'id al-Ushûliyah*.

##### 1. Pengertian *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dan Ruang Lingkup pembahasannya

**A**l-qawâ'id al-fiqhiyah merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu "qawâ'id" dan "fiqhîyah". Hubungan dari dua kata tersebut dalam ilmu nahwu disebut dengan hubungan "shifah" dengan "maushûf", atau "na'at" dengan "man'ût."

Kata *al-qawâ'id* (القواعد) merupakan bentuk *jama'* dari kata *al-qâ'idah* (القاعدة) yang berarti ونحوه (fondasi rumah atau bangunan lain). Dalam arti ini, kata tersebut tercantum dalam firman Allah (Q.S. 2:127), yaitu :

واذيرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل

Dan ingatlah ketika (Nabi) Ibrahim meninggikan fondasi bayt Allah (Ka'bah) bersama Ismail.

Menurut ahli nahwu, kaidah berarti:

الحكم الكلي المنطبق علي جميع جزئيا ته

*Hukum kulli (universal) yang bisa diacu pada semua partikularnya*<sup>1</sup>

Ulama' ushul fiqh mendefinisikan "kaidah" dengan "sesuatu yang biasanya atau ghalibnya begitu". Sebagaimana ungkapan mereka:

حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئيا ته

*hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya.*<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Ahmad al-Syāfi'ī kaidah adalah:

القضايا الكلية التي يندرج تحت كل واحد منها حكم جزئيات كثيرة

*Proposisi yang bersifat kulli (universal) yang membawahi banyak hukum juz'ī atau proposisi umum yang di dalamnya tercakup keputusan bagi satuan-satuan yang berjumlah banyak.*<sup>3</sup>

Adapun kata "al-fiqhīyah" berasal dari kata "al-fiqh" yang berarti "al-fahm" (mengerti), yang dirangkaikan dengan *ya' nisbat*, sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari pengertian ini bisa dipastikan bahwa di dalam ilmu fiqh peranan penalaran (pemahaman) yang berarti juga peranan akal sangatlah mutlak.

Pengertian "fiqh" Menurut istilah adalah:

هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.

*Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syari'at praktis yang diperoleh dari*

1 Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhīyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

2 Tim Depag RI, *Ushul Fiqh*, jilid II, (Jakarta: P3SPTU, 1986), 180-181.

3 Ahmad Muhammad Al-Syāfi'ī, *Ushul Fiqh al-Islāmī*, (T.tp.: Iskandariah Muassasah Tsaqafah al-Jāmi'iyah, 1983.), 4.

*dalil-dalilnya yang terperinci atau kompilasi hukum syari'at praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.*<sup>1</sup>

Al-Jurjani al-Hanafi<sup>2</sup> memberikan pengertian fiqh dengan:

العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية وهو علم مستتب بالرأى والاجتهاد ويحتاج فيه الى النظر والتأمل

*Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah (praktis) yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili, dan diistinbathkan lewat ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan.*

Sedangkan Ibnu Khaldun<sup>3</sup> memberikan definisi "fiqh" dengan:

الفقه معرفة احكام الله تعالى في افعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكرهه والإباحة وهي متلقة من الكتاب والسنة ومانصبه الشارع لمعرفة من الأدلة فاذا استخرجت الاحكام قيل لها فقه

*Pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan Mukallaf, (diistinbathkan) dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara', bila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalil, maka terjadilah apa yang dinamakan fiqh.*

Apabila dicermati ketiga pengertian fiqh di atas, maka makna "fiqh" berkisar pada rumusan sebagai berikut:

a. Fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum Allah,

1 Zainal Abidin Ahmad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975.), 9. Lihat pula dalam Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994.), 24-28.

2 Dikutip oleh Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.

3 Ibid, 27



- b. Hukum yang dibahas mencakup hukum amali,
- c. Obyek hukum pada orang mukallaf,
- d. Sumber hukum berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah atau dalil lain yang bersumber pada kedua sumber utama tersebut,
- e. Dihasilkan dengan jalan *istinbath* atau *ijtihad* sehingga kebenarannya bersifat *dhanni*.

Berangkat dari pengertian-pengertian di atas, maka beberapa ahli dalam disiplin ilmu ini memberi definisi "kaidah *fiqhiyah*", sebagai berikut:

- a. Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa<sup>1</sup>.

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

Pokok-pokok/prinsip-prinsip *fiqh* yang bersifat *kullî* dalam bentuk teks-teks perundang-undangan (diktum) yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya.

- b. Menurut Hasbi Asy-Shidieqy<sup>2</sup>

قواعد الأحكام الكلية المستنبطة من الأدلة الكلية ومن مقاصد الشرع في وضعه المكلف تحت أعباء التكليف ومن فهم أسرار التشريع وحكمه

Kaidah-kaidah hukum yang bersifat *kullîyah* yang dipetik dari dalil-dalil *kullî* (yaitu ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjadi pokok

kaidah-kaidah *kullîyah* yang dapat disesuaikan dengan banyak *juz'îyah*); dan dari maksud-maksud *syara'* dalam meletakkan mukallaf di bawah bebanan taklif; dan dari memahami rahasia-rahasia *tasyri'* dan hikmah-hikmahnya.

Apabila dipahami, pengertian "kaidah *fiqhiyah*" menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa tersebut lebih menekankan pada bentuk dan isi. Sedangkan pengertian "kaidah *fiqhiyah*" menurut Hasbi Asy-Shidieqy lebih menekankan pada isi dan sumber pengambilan serta perumusannya.

- c. Imam Tajuddin al-Subkî<sup>1</sup>

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها

Suatu perkara yang *kullî* yang bersesuaian dengan *juz'îyah* yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum *juz'îyah* itu.

- d. Ahmad Muhammad al-Syâfi'<sup>2</sup>

القضايا المتعلقة بالأسس التي بنى عليها الشارع أحكامه والأغراض التي قصد إليها بتشريعه

Proposisi-proposisi yang berkaitan dengan azas hukum yang dibangun oleh *syari'* serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pen-syari'atannya.

Berdasarkan pengertian kaidah *fiqhiyah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna 'kaidah *fiqhiyah*' adalah:

- a. Bersifat *kullî*,
- b. Diambil dari dasar yang *kullî* (*nash*),
- c. Berbentuk teks perundang-undangan yang ringkas,
- d. Ditetapkan oleh ulama *fiqh*,

1 Musthafa Ahmad al-Zarqa dalam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyah*, 6.

2 Ash-Shiddieqy, *Pengantar ...*, 132.

1 Lihat Imam Tajuddin al-Subkî dalam Asjmunî A. Rahman, *Qā'idah-qā'idah Fiqh: (Qawā'id al-Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 11.

2 Al-Syāfi', *Ushul Fiqh*, 5.



- e. Sebagai sarana untuk memahami maksud syara' dalam menetapkan hukum dan rahasia-rahasia *tasyri'* dan hikmah-hikmahnya,
- f. Merupakan pedoman umum yang bersesuaian dengan *juz'iyah* (kasus baru yang belum mendapat keputusan hukum) yang banyak jumlahnya,
- g. Dapat dipakai untuk mengetahui status hukum *juz'iyah* tersebut hingga benar-benar mencerminkan *maslahah*.

Makna kaidah *fiqhiyah* di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup pembahasan kaidah *fiqhiyah* adalah semua masalah yang berhubungan dengan fiqh, yaitu masalah-masalah fiqh yang belum mendapatkan kepastian hukum atau belum ada *nash*-nya. Di sini ia berfungsi sebagai kunci berfikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fiqh yang belum mendapatkan kepastian hukum tersebut, hingga ia mencerminkan *maslahah*.

## 2. Pengertian *al-Qawâ'id al-Ushûliyyah* dan Ruang Lingkupnya

*Al-Qawâ'id al-Ushûliyyah* merupakan rangkaian dari dua kata *qawâ'id* dan *Ushûliyyah*. Kata *qawâ'id* merupakan *jama'* dari kata *qâ'idah* yang berarti "asas" menurut Hasbi ash-Shiddieqy, dan "sesuatu yang biasanya atau ghalibnya begitu", menurut ulama ushul fiqh. Sebagaimana ungkapan mereka:

حكم أغلبى ينطبق على معظم جزئيا ته

Hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya.<sup>1</sup>

Pengertian *qâ'idah* tersebut nampaknya yang paling tepat, sebab pada dasarnya keberlakuan *qâ'idah* bersifat sebagian besar

bukan keseluruhan, hal ini berdasarkan argumen:

- a. *Qâ'idah* merupakan hasil *ijtihad* ulama, yang masing-masing ulama mempunyai *qâ'idah istinbâthiyah* sendiri-sendiri sehingga hasil *ijtihad*-nya berbeda juga.
- b. Perumusan *qâ'idah* berasal dari dalil, sedangkan dalil itu sendiri ada yang bersifat pasti (*qath'i*) dan ada yang bersifat merupakan dugaan kuat (*dhannî*), dan masih terdapat perselisihan dalam menentukan mana yang *qath'i* dan *dhannî*.
- c. Setiap rumusan hukum fiqh selalu ada pengecualian (*exemption*), sehingga dalam kondisi pengecualian ini tidak mengkaitkan dengan keberlakuan *qâ'idah*.<sup>1</sup>

Sedangkan *lafadh al-Ushûliyyah* diambil dari kata "ashl" yang diberi *ya' nisbat* yang berfungsi untuk menjeniskan, dalam arti etimologi memiliki makna "sesuatu yang dijadikan dasar atas sesuatu yang lain"

Dalam arti termonologi *ashl* mempunyai lima (5) pengertian, yaitu :

- a. *Ashl* berarti "kaidah yang bersifat menyeluruh". Misalnya kebolehan memakan bangkai bagi yang terpaksa, itu menyalahi kaidah *kullîyyah* "kullu maytah harâm".
- b. *Ashl* berarti "yang lebih kuat (*râjih*)". Misalnya ungkapan kalimat الأصل في الكلام الحقيقة (*ashl yang lebih kuat dari suatu ungkapan adalah makna yang sebenarnya bukan makna simbolik*)
- c. *Ashl* berarti "hukum ashal" (*mustashhab*). Misalnya ungkapan kalimat الأصل بقاء ما كان على ما كان (*hukum ashl adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada*).

<sup>1</sup> Menurut Muchlis Usman, keberlakuan *qâ'idah* baik *qâ'idah ushuliyah* maupun *fiqhiyah* adalah bersifat sebagian bukan keseluruhan. Lihat dalam Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 4.

- d. *Ashl* berarti "maqîs 'alayh" (dalam bab *qiyâs*). Misalnya keberlakuan hukum *ribâ* bagi beras dan gandum. Beras merupakan *maqîs* (yang diserupakan) yang dikatakan *far'*, sedangkan gandum adalah *maqîs 'alayh*-nya yang dikatakan sebagai *ashl*.
- e. *Ashl* berarti "dalil". Misalnya ungkapan "ashl masalah ini adalah al-Qur'ân dan al-Sunnah" yakni dalilnya<sup>1</sup>.

Dengan demikian, pengertian "kaidah *ushuliyah*" adalah suatu hukum *kullî* yang dapat dijadikan standar hukum bagi *juz'î* yang diambil dari dasar *kullî* yakni al-Qur'ân dan al-Sunnah<sup>2</sup>, yang berarti bisa dikatakan bahwa kaidah *ushuliyah* merupakan kaidah *istinbathiyah* ataupun kaidah *lughawiyah*. Pengertian kaidah *ushuliyah* lainnya adalah :

القواعد التي تبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

Kaidah-kaidah yang menjelaskan prosedur yang wajib dilalui oleh seorang ahli *fiqh* dalam menyimpulkan hukum *syar'î* dari dalil-dalilnya yang terperinci<sup>3</sup>.

Kalau kita melihat dari pengertian di atas, maka penggunaan kaidah-kaidah *ushuliyah* adalah untuk memperoleh dalil hukum dan hasil hukumnya. Bisa juga dikatakan ruang lingkup pembahasan dari kaidah *ushuliyah* adalah penetapan semua masalah hukum misalnya penetapan hukum *amr*, *nahy*, 'âm, *khâs*, *muthlaq*, *muqayyad*, *mujmal*, *mufashshal* dan segala kaidah yang berkaitan dengan kebahasaan yang dipetik dari kaidah 'Arabîyah, *ushub-ushub* dan *tarkib-tarkib*-nya<sup>4</sup>.

### 3. Perbedaan *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dengan *al-Qawâ'id al-Ushûliyah*

Walaupun dalam aplikasinya antara *al-qawâ'id al-fiqhîyah* dengan *al-qawâ'id al-ushûliyah* selalu berkaitan, tetapi kedua kaidah ini sangat berbeda. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* merupakan kaidah yang membahas semua masalah yang berkaitan dengan *fiqh*, yaitu masalah-masalah *fiqh* yang belum mendapatkan kepastian hukum atau belum ada nash-nya, sedangkan *al-qawâ'id al-ushûliyah* merupakan kaidah yang ruang lingkup pembahasannya tentang penetapan hukum *amr*, *nahy*, 'âm, *khâs*, *muthlaq*, *muqayyad*, *mujmal*, *mufashshal* dan segala kaidah yang berkaitan dengan kebahasaan.

Secara rinci perbedaan tersebut bisa dideskripsikan dari berbagai aspek/segmen yaitu:

- Apabila dilihat dari segi kelahirannya, maka *al-qawâ'id al-ushûliyah* dilahirkan sebelum *fiqh*, sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* sesudah *fiqh*.
- Al-qawâ'id al-ushûliyah* dicetuskan oleh *ushûlî* atau ahli *ushul fiqh* (yang umumnya juga sebagai *faqîh*), sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* dibuat oleh *faqîh* (yang umumnya juga sebagai *ushûlî*).
- Sasaran *al-qawâ'id al-ushûliyah* adalah memahami ungkapan *nash* (al-Qur'ân dan al-Hadits), sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* untuk memahami kasus-kasus hukum baru.
- Apabila dilihat dari bahan pembuatannya, maka *al-qawâ'id al-ushûliyah* dibuat dari filsafat bahasa dan kelaziman pemakaian bahasa, sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* dibuat dari *fiqh* (sebagai bahan utamanya)
- Apabila dilihat dari fungsinya, maka *al-qawâ'id al-ushûliyah* berfungsi sebagai *istinbath* sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* adalah menyelesaikan kasus-kasus hukum yang baru.
- Sedangkan apabila dilihat dari segi daya cakupnya, maka

1 Abdul Hamid Hakim, *al-Bayân*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1983), 3.

2 Al-Syâfi'i, *Ushul Fiqh*, 4-5.

3 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Kuwaytiyah, 1968), 12.

4 Ash-Shiddieqy, *Pengantar*, 40.

*al-qawâ'id al-ushûliyyah* adalah seluruh satuan sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* sebagian besar satuan (*aghlabiyyah*), oleh karena itu *al-qawâ'id al-fiqhîyah* terdapat *mustatsnayât* (pengecualian).

- g. Wewenang/kompetensi *al-qawâ'id al-ushûliyyah* adalah kasus yang ada *nash*-nya sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* adalah kasus yang belum disikapi oleh *nash*.
- h. *Al-qawâ'id al-ushûliyyah* ini mempunyai kekuatan yang mandiri atau dominan atas kaidah-kaidah yang lain, sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* tidak mandiri dan apabila bertentangan dengan *al-qawâ'id al-ushûliyyah* maka dimenangkan *al-qawâ'id al-ushûliyyah*-nya.
- i. Apabila dilihat dari segi tanggung jawabnya, maka *al-qawâ'id al-ushûliyyah* bertanggung jawab atas perumusan hukum tahap awal sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* bertanggung jawab atas perumusan akhir sampai benar-benar mencerminkan *maslahat*.
- j. Apabila dilihat dari segi jenis kebenarannya, maka *al-qawâ'id al-ushûliyyah* lebih bersifat yuridis formal sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* lebih bersifat materiil.

## B. Hubungan *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dengan *al-Qawâ'id al-Ushûliyyah*, *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*.

Dalam aplikasinya, *al-qawâ'id al-fiqhîyah* tidak bisa terlepas dari *al-qawâ'id al-ushûliyyah*, *fiqh* dan *ushul fiqh*, semuanya saling berkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya di bawah ini bisa dilihat hubungan masing-masing ilmu tersebut.

### 1. Hubungan *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dengan *al-Qawâ'id al-Ushûliyyah*

Jika *al-qawâ'id al-ushûliyyah* dicetuskan oleh ulama' *ushûl*, maka *al-qawâ'id al-fiqhîyah* dicetuskan oleh ulama *fiqh*, namun

aplikasi dari kedua kaidah tersebut selalu berkaitan. Mengingat *al-qawâ'id al-ushûliyyah* memuat pedoman dalam penggalian hukum Islam dari sumber aslinya, sedangkan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* merupakan juklak atau petunjuk operasional dari kaidah *ushûliyyah* tersebut. Dan keduanya merupakan patokan dalam meng-*istinbath*-kan hukum Islam. Untuk itu keduanya harus digabungkan agar memperoleh hasil yang maksimal.

Menurut Amran Khan Nyazee, "*al-qawâ'id al-ushûliyyah governs the interpretation and al-qawâ'id al-fiqhîyah governs the law*". Maksudnya bahwa *al-qawâ'id al-ushûliyyah* bertugas menafsirkan sumber-sumber tekstual (*al-Qur'ân* dan *al-Hadits*), dan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* bertanggung jawab atas perumusan akhir dari aturan hingga ia benar-benar mencerminkan *maslahah*. Di dalam aplikasinya *al-qawâ'id al-fiqhîyah* juga tidak boleh bertentangan dengan *al-qawâ'id al-ushûliyyah* dan tidak bisa mandiri, jadi masih harus mempertimbangkan keberadaan *al-qawâ'id al-ushûliyyah*.

### 2. Hubungan *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dengan *Fiqh*

Di dalam sejarah perumusan *al-qawâ'id al-fiqhîyah*, sumber pokok yang dijadikan bahan perumusannya adalah *fiqh*. Ini berarti *al-qawâ'id al-fiqhîyah* mempunyai hubungan yang sangat erat dengan *fiqh*. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* merupakan kunci berfikir di dalam pengembangan *fiqh*<sup>1</sup>. Dengan bantuan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* semua permasalahan hukum (*fiqh*) baru yang ada dalam masyarakat akan semakin jelas dan dengan mudah akan dapat dipecahkan.

Menurut Al-Qarafi, "*al-qawâ'id al-Fiqhîyah* ini sangat penting di dalam *fiqh* dan besar manfaatnya. Dan dengan menguasai *al-qawâ'id al-fiqhîyah* menjadi besar dan mulia kedudukan

<sup>1</sup> Musbikin, *Qawâ'id*, 13.



seorang faqih. Barang siapa mengambil hukum-hukuk *furu'* (berdasarkan persesuaiannya) dengan *juz'iyah* tanpa menggunakan *al-qawâ'id al-kullîyah*, maka hasilnya akan bertentangan dan berbeda-beda di antara *furu'* itu, di samping akan goncang perhatiannya dan selalu kabur serta merasa sempit dan putus asa. Dan menghafal masalah *juz'iyah* yang tidak terbatas itu dia perlu menghabiskan umurnya, sedang yang digarap tidak akan tercapai. Adapun orang yang dapat mengikat fiqh dengan *qâ'idah-qâ'idahnya*, maka ia tidak perlu menghafal *juz'iyah* yang banyak jumlahnya, karena masalah-masalah *juz'iyah* itu sudah masuk dalam *qâ'idah-qâ'idah kulliyah*.<sup>1</sup>

Pendapat al-Qarafi di atas menunjukkan bahwa *al-qawâ'id al-fiqhîyah* sangat berhubungan dengan tugas pengabdian ulama fiqh dalam rangka mendinamiskan dan mengefektifkan ilmu fiqh ke arah pemecahan problema hukum yang ada di dalam masyarakat. Tanpa berpegang kepada *al-qawâ'id al-fiqhîyah*, seorang faqih tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, *al-qawâ'id al-fiqhîyah* tidak bisa diabaikan oleh ulama' fiqh, bahkan wajib dipelajarinya.

### 3. Hubungan *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dengan Ushul Fiqh

Ushul fiqh merupakan seperangkat kaidah (metode berfikir) guna mendukung cara atau upaya yang ditempuh dalam proses penetapan hukum dari sumber atau dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>2</sup> Ilmu ushul fiqh juga dikatakan sebagai metodologi hukum Islam (*minhaj istinbâth al-ahkâm*), yakni metode yang memuat prosedur dan teknik bagaimana hukum syari'at dapat dirumuskan dalam pedoman bertingkah laku dan bagaimana jalan pikiran menuju proses pembentukan hukum itu.

1 Dikutip oleh Rahman, *Qa'idah-qâ'idah Fiqh*..., 19.

2 Musbikin, *Qawâ'id*, 9.

Dengan demikian, ushul fiqh menghasilkan aturan-aturan fiqh tentang perbuatan *mukallaf* (subyek yang dibebani hukum) dalam setiap cabang hukum, kemudian aturan yang beragam itu disatukan menjadi sebuah kerangka konseptual yang disebut dengan "kaidah fiqh".

## C. Tujuan, Manfaat dan Fungsi *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

### 1. Tujuan mempelajari *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

*Al-qawâ'id al-fiqhîyah* mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam bidang *tasyrî'*, sehingga para ulama ahli hukum (fiqh) dari berbagai madzhab benar-benar mencurahkan perhatian kepadanya. Kaidah-kaidah fiqh itu mereka perlukan dalam melakukan *istinbâth* hukum, karena kaidah-kaidah fiqh tersebut merupakan instrumen (alat) di dalam proses dan prosedur penetapan hukum.

Kaidah-kaidah *fiqhîyah* ini perlu dipelajari guna mengetahui prinsip-prinsip umum dalam melakukan *istinbâth* hukum atas masalah-masalah baru yang belum ditunjuk oleh *nash syar'i* (al-Qur'ân, Sunnah/Hadits) secara *shahih* dan sangat memerlukan ketetapan hukum.<sup>1</sup>

Terkait dengan hal ini, Abdul Mun'im Shaleh<sup>2</sup> menyimpulkan bahwa tujuan mempelajari *al-qawâ'id al-fiqhîyah* adalah:

- Memahami hakikat fiqh dengan cara mendalami *hikmah* dan '*illah* (*raison d'être*) hukum.
- Setelah memahami *hikmah* dan '*illah*, orang diharapkan memperoleh ketrampilan untuk melakukan *ilhaq*. Ketrampilan ini berguna untuk menghadapi kasus-kasus hukum baru yang belum mendapatkan jalan keluar. *Ilhaq* ini juga

1 Musbikin, *Qawâ'id*, 20.

2 Pengajar *al-qawâ'id al-fiqhîyah* di STAIN Ponorogo.

diperlukan dalam rangka meninjau ulang terhadap ketentuan-ketentuan fiqh yang telah ada, karena mungkin beberapa di antaranya perlu diperiksa lagi berkenaan dengan perkembangan zaman yang seringkali merubah orientasi tentang *mashlahah*.

- c. Setelah orang mempunyai kemampuan *ilhaq*, ia akan terasah tingkat kepekaannya dalam menghadapi kasus-kasus hukum baru yang perlu penyelesaian.

## 2. Manfaat mempelajari *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

Adapun faedah yang nyata bagi kita mempelajari kaidah-kaidah *fiqhîyah* tersebut adalah:

- a. Agar seseorang terlatih dan terasah ketrampilannya dalam penalaran fiqh,
- b. Agar seseorang memahami hakikat fiqh,
- c. Agar seseorang dapat dengan cepat mengenali dalil-dalil atau indikasi-indikasi yang menunjukkan pemecahan terhadap kasus-kasus fiqh.
- d. Memahami rahasia (*illat; hikmah*) di balik ketentuan fiqh yang bisa membawa seseorang mendapat ketrampilan melakukan *ilhaq*, mengembangkan ketentuan fiqh pada kasus-kasus baru yang belum mendapat ketentuan hukum,
- e. Mendapat kemudahan di dalam menguasai cabang-cabang fiqh yang tersebar luas dengan cara menguasai kaidah-kaidahnya.

## 3. Fungsi *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

- a. Sebagai prinsip dan tujuan hukum yang memberikan pesan yang kuat akan *mashlahah* kepada para pemikir hukum dalam melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber tekstual. Dengan kata lain, kaidah-kaidah fiqh ini mem-

berikan wawasan *mashlahah* dalam kegiatan *ijtihad*.

- b. Sebagai "semacam" sumber hukum untuk menangani kasus-kasus yang belum disikapi atau belum diatur dalam sumber-sumber tekstual.
- c. Sebagai rangkuman global dari keseluruhan rincian detail fiqh (kristalisasi fiqh) untuk memudahkan penguasaan untuk maksud-maksud koordinatif. Secara umum, kaidah-kaidah fiqh membawa pesan moralitas hukum bahwa hukum mestilah bermuatan *mashlahah*, sehingga fiqh yang dihasilkan seharusnya mempunyai kebenaran materiil di samping kebenaran formal. Dengan demikian, prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengandung nilai-nilai universal dapat ditegakkan sebaik mungkin.

## D. Dasar-dasar Pengambilan *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

Dasar-dasar atau sumber-sumber pengambilan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* ada dua macam yaitu dasar formil dan materiil<sup>1</sup>. Pertama, dasar formil adalah dasar yang dijadikan ulama di dalam merumuskan *al-qawâ'id al-fiqhîyah*, yaitu *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits).

Misalnya kaidah yang berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

Kesukaran mendatangkan kemudahan.<sup>2</sup>

Kaidah ini merupakan hasil perumusan ulama tentang *rukhsah* (dispensasi) yang diperbolehkan bagi manusia sesuai dengan tingkatan kesulitannya. Kaidah ini dirumuskan juga dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia, karena pada dasarnya syar'ah itu diciptakan bukan untuk kepentin-

<sup>1</sup> Musbikin, *Qawâ'id*, 23

<sup>2</sup> Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum*, 436-437.



gan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sedangkan dasar pengambilan kaidah ini adalah al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. (QS. al-Baqarah:185)

وما جعل لكم في الدين من حرج

Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan. (QS. al-Hajj:78)

الدين يسر احب الدين الى الله الحنيفية السمحة (رواه البخارى)

Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

بعثت بالحنيفية السمحة (رواه احمد عن ابن عباس)

Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah. (HR. Ahmad dari Ibn Abbas)

Kedua, dasar materiil, maksudnya bahwa redaksi al-qawâ'id al-fiqhîyah ini dirumuskan bukan hanya semata-mata hasil pemikiran ulama saja, tetapi terkadang juga dari nash (al-Qur'an dan al-Hadits) seperti kaidah:

الضرر يزال

Kemadlaratan harus dihilangkan.

Kaidah ini berasal dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwattha', dari 'Amr bin Ya-

hya dari ayahnya, hadits ini walaupun tergolong hadits yang *mursal*, tetapi hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqy dan al-Daruquthny dari Abu Sa'id al-Khudry. Lafadz ini juga di-takhrij-kan oleh Ibn Majah dari Ibn Abbas dan 'Ubadah bin Al-Shamid.<sup>1</sup>

### E. Sebab-Sebab Pembukuan al-Qawâ'id al-Fiqhîyah

Wilayah kajian fiqh sangat luas mencakup segala segi tingkah laku/perbuatan manusia, yang terdiri atas berbagai hukum *furu'*, oleh karena itu diperlukan kristalisasi berupa kaidah-kaidah *kulli* yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu'* menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.

Banyak fuqaha yang berkata terkait dengan al-qawâ'id al-fiqhîyah ini:

من راعى الاصول كان حقيقا بالوصول ومن راعى القواعد كان خليقا باذراك المقاصد

Barang siapa memelihara *ushul*, maka ia akan sampai kepada maksud, dan barang siapa memelihara *qawâ'id* selayaknya ia mencapai tujuan hukum.<sup>2</sup>

Dalam kitab al-Farâ'id al-Bahîyyah disebutkan:

انما تضبط بالقواعد فحفظها من اعظم الفوائد

Sesungguhnya cabang-cabang masalah fiqh itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah *fiqhîyah*, maka menghafalkan kaidah itu besar fungsinya.<sup>3</sup>

Selanjutnya Imam Muhammad Izzuddin ibn 'Abd al-Salam menyimpulkan bahwa Al-qawâ'id al-fiqhîyah merupakan ja-

<sup>1</sup> Musbikin, *Qawâ'id*, h. 25

<sup>2</sup> A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, h. 17

<sup>3</sup> *Ibid*.

lan untuk mendapatkan suatu kemaslahatan dan menolak kerusakan<sup>1</sup>, serta sangat besar manfaatnya di dalam memberi petunjuk kepada hukum-hukum *furu'* bila kita memerlukan *hujjah* dan dalil serta meng-*istinbath*-kan hikmah. Karena itu para fuqaha dari berbagai golongan mazhab memperhatikan kaidah-kaidah itu.

Sedangkan sebab utama dari pembukuan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* adalah karena para fuqaha dari berbagai golongan madzhab telah mengembalikan segala masalah fiqh kepada kaidah-kaidah *fiqhîyâh* (*kullîyah*). Kaidah-kaidah itu diterima oleh semua pihak, di-*i'tibar*-kan dan dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum suatu masalah. Oleh karena itu, memelihara dan membukukan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* sangat urgen dilakukan.<sup>2</sup>

## E. Sejarah Pembentukan dan Pembukuan *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

### 1. Periode Pembentukan

*Al-qawâ'id al-fiqhîyah* disusun berangsur-angsur oleh tokoh-tokoh hukum dari berbagai madzhab yang mempunyai kemampuan *takhrij* dan *tarjih* dengan meng-*istinbath*-kan dari nash-nash syari'ah yang bersifat *kullî*, dasar-dasar ushul fiqh, *illat-illat* hukum dan ketetapan buah pikiran mereka.<sup>3</sup> Pada umumnya para ulama' sekarang kesulitan untuk menentukan kapan dan siapakah yang pertama menuliskan kaidah-kaidah yang ada sekarang ini. Namun kemungkinan besar sejak abad kedua Hijriah telah ada. Hal itu terbukti dengan ditemukannya salah satu kaidah yang berasal dari kitab "*al-Kharraj*" susunan

<sup>1</sup> Ibid, 17-19

<sup>2</sup> Ibid, 26.

<sup>3</sup> Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum, 435.

Abu Yusuf (113-182H) yang berbunyi :

ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

Tidak ada wewenang bagi Imam untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Namun apakah Abu Yusuf adalah ulama' yang pertama yang mencetuskan kaidah *fiqhîyâh*, juga masih belum jelas. Sebab apabila materi kaidah tersebut ditetapkan sebagai dasar awal penyusunan, maka bagaimanakah dengan hadits Nabi di bawah ini, yang juga merupakan kaidah *fiqhîyah*, yaitu:

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh memadharatkan orang lain.

Menurut keterangan Asmuni A.Rahman<sup>2</sup>, kaidah yang ditulis oleh Imam Abu Yusuf di atas, semula merupakan saran yang diberikan kepada Raja Harun al-Rasyid. Sedangkan salah seorang ulama Hanafiah, yaitu Ibn Nujaym berpendapat bahwa ulama-ulama Hanafiah yang lebih dulu berusaha dalam bidang ini. Ia mengatakan:

ان اصحابنا (يريد علماء الحنفية رحمهم الله) لهم خصوصية السبق في هذا الشأن والناس لهم اتباع وهم في الفقه عيال على ابي حنيفة

Sesungguhnya sahabat-sahabat kami (maksudnya ulama-ulama Hanafiah) mempunyai keistimewaan, yaitu mendahului orang lain dalam urusan ini.

<sup>1</sup> Rahman, Qaidah-Qaidah, h. 11.

<sup>2</sup> Lihat Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, 12., dan Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah, 99-100., lihat pula pada Musbikin, Qawâ'id, 27-28.

Dan orang-orang lain menjadi pengikut mereka dan mereka semua dalam masalah *fiqh* menjadi pengikut bagi Abû Hanifah.<sup>1</sup>

## 2. Periode Pertumbuhan Al-qawâ'id Al-fiqhiyah dan Perkembangan Kitab-kitab yang Membahasnya.

Kaidah-kaidah *fiqh* ada yang diambil dari redaksi surat Khalifah Umar bin Khatthab kepada Abdullah bin Qays yang terkenal dengan gelar Abu Musa al-Asy'ari pada tahun 12 H, sewaktu yang bersangkutan diangkat menjadi walikota Basrah. Surat tersebut berbunyi :

اعرف الأمثال والأشباه وقش الأمور بنظائر ها

Pelajarilah segala soal-soal yang serupa dan bersamaan, dan qiyâskanlah segala urusan kepada hal-hal yang sebanding.<sup>2</sup>

Dengan diilhami dari surat di atas, para ulama meletakkan *al-qawâ'id al-fiqhiyah* di bawah pokok persoalan satu, yang mereka namakan dengan "al-asybâh wa al-nadhâir". Yang maksudnya dengan menggunakan analogi atau *qiyâs* dapat diterangkan hukum tentang masalah-masalah yang sejenis.<sup>3</sup>

Menurut Ibnu Nujaym (wafat th 970H.), penyusun pertama kaidah *fiqhiyah* adalah Abû Thahir al-Dabbâs, seorang pemikir ahli *ra'y* di Irak. Beliau seorang Ulama yang hidup pada abad III dan IV Hijriah. Dia mengumpulkan kaidah terpenting dari Abu Hanifah sebanyak 17 buah kaidah. Abû Thahir selalu membaca kaidah itu, bahkan seorang ulama *Syafi'iyah* pernah datang kepadanya dan menukil beberapa kaidah induk yang terdiri dari lima kaidah *fiqhiyah* (*kulliyah*). Kaidah-kaidah tersebut adalah :

1 Ibn Nujaim adalah seorang ulama' Hanafiah yang menyelaraskan kaidah-kaidah yang diambil atau dinukil dari kitab *al-Asybah wa al-Nadhâir* karya Imam Suyûthî dengan mazhab Hanafi, lihat dalam Musbikin, *ibid*, 28.

2 Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum*, 98.

3 Tim Depag. RI., *Ushul Fiqh I dan II*, (Jakarta: P3SPTU, 1986.), 187.

الأمر بمقاصدها

Segala urusan adalah menurut maksud si pelakunya

الضرر يزال

Kemadllaratan harus dihilangkan

العادة محكمة

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan tidak dapat hilang lantaran timbul keraguan.

المشقة تجلب التيسر

Kesukaran mendatangkan kemudahan.<sup>1</sup>

Kaidah-kaidah yang berjumlah 17 buah itu kemudian ditambah menjadi 37 kaidah oleh Imam Abû al-Hasan Abdullah bin al-Hasan (260-340 H) yang terkenal dengan sebutan al-Karkhî. Kemudian kitab itu dikomentari dan diberi contoh-contoh oleh Imam Najmuddin Abu Hafs Umar al-Nafasî (537 H). Setelah itu tampillah Imam Abdullah bin Umar bin Isa al-Qadhî yang diberi gelar Abu Zayd al-Dabûsî (430 H) yang menyusun kitab *Tâ'sis al-Nadhar* yang berisikan kaidah-kaidah *kulliyah* disertai dengan hukum perinciannya.

Adapun kitab-kitab yang disusun oleh para ulama tersebut adalah :

a. Kalangan ulama' Hanafiah.

1. Abû Tâhir al-Dabbâs, seorang *faqîh* abad ketiga dan keempat Hijriyah. Ia berhasil mengumpulkan 17 kaidah, kemudian diteruskan oleh Imam Abû al-Hasan

1 Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum*, 436-437.

al-Karakhi, yang mencantumkan 17 kaidah itu lalu menyempurnakannya menjadi 37 buah<sup>1</sup>.

2. Imam Abû Zayd Abdullah Ibn Umaruddin al-Dâbûsî al-Hanafî (abad V H), dengan kitab *Ta'sîs al-Nadhar*. Kitab itu tidak hanya memuat kaidah-kaidah *fiqhiyah* tetapi juga perinciannya.<sup>2</sup>
3. Kitab *al-Asybah wa al-Nadhâir* karangan dari Zayn al-Âbidîn bin Ibrâhîm al-Misri atau lebih terkenal dengan sebutan Ibn Nujaym (926-970 H), berisikan 25 buah kaidah yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berupa kaidah-kaidah *asâsiyah* yang berjumlah 6 buah.<sup>3</sup> Lima buah sama dengan lima kaidah *asâsiyah* dalam mazhab Syafi'iyah, dan yang satu lagi yang berbeda adalah kaidah

#### لا ثواب الا بالنية

Tidak ada pahala, kecuali dengan niat.

Sedangkan bagian kedua dari kaidah tersebut terdiri dari 19 buah kaidah, yang terperinci menjadi beberapa *maudlu'* yang berbeda-beda, yang diberi keterangan secara mendetail dalam bentuk hukum *furu'* yang praktis. Kitab ini telah disyarah oleh Ahmad ibn Muhammad al-Hamawî dari fuqaha abad XI Hijriah yang dinamai dengan *Ghamz 'Uyûn al-Bashâir*.

4. Abû Sa'id al-Khâdimî pada abad keduabelas dengan kitabnya *Majma' al-Haqâiq*, kitab ini mempunyai keistimewaan yaitu mengurutkan kaidah sesuai dengan abjadnya, mencapai 154 kaidah. Sebenarnya beliau memodifikasi dari kitabnya Ibn Nujaym. Kemudian kitab tersebut diberi syarah oleh Musthafa

Muhammad dalam kitabnya yang bernama *Manâfi' al-Daqâ'iq*.<sup>1</sup>

5. Setelah itu kaidah-kaidah dari Abu Sa'id al-Khâdimî disarikan dalam majalah *al-Ahkâm al-'Adliyyah* dengan ditambah beberapa kaidah dan semuanya berjumlah 99 kaidah, oleh Mahmud Hamzah (seorang Mufti Damaskus yang hidup pada masa Sultan Abul Hamid) disusun dalam sebuah kitab yang bernama *al-Farâid al-Bahiyah Fi al-Qawâ'id Wa al-Fawâ'id al-Fiqhiyah*. Di samping itu beliau juga menyebutkan kaidah-kaidah hukum *asâsi* yang dinamakan *al-Farâid*, yang kemudian pembahasannya diperluas dan diterbitkan di Damaskus pada tahun 1298 H.
6. Kemudian pada masa Turki Utsmani, dibuat rencana undang-undang yang kemudian menjadi kitab *fiqh* yang bernama *Majallat al-Ahkâm al-Adliyyah*, pada pasal 2 sampai 100 berisi kaidah *fiqhiyah*, yang diambil dari kaidah-kaidah yang ditulis oleh Ibn Nujaym dan al-Khâdimî. Kaidah-kaidah itu oleh Musthafa Ahmad Zarqa ditulis dan diberi komentar dengan tambahan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî fi Tsawbih al-Jadîd* pada tahun 1361 Hijriah<sup>2</sup>.

#### b. Kalangan Ulama' Malikiyah:

1. Imam Juzaym, menyusun kitab yang berjudul *al-Qawâ'id*.
2. Syihab al-Din Abû al-Abbas Ahmad Ibn Idrîs al-Qarafi (684 H) dengan kitabnya *Anwâr al-Buruq fi Anwâr al-Furuq* atau *Anwâr wa al-Qawâ'id al-Saniyah fi al-Asrâr al-Fiqhiyah*. Beliau adalah murid dari al-'Izz Ibn Abdi Salam yang wafat pada tahun 863 H. Kitab

1 A. Rahman, *Qa'idah*, 12

2 *Ibid.*

3 Lihat dalam Musbikin, *Qawâ'id*, 32-33.

1 A. Rahman, *Qa'idah*, 13.

2 Lihat Musbikin, *Qawâ'id*, 34-35.



itu berisi 548 kaidah, yang tiap-tiap kaidah diberi contoh-contoh *furû'* yang *munâsabah*, sehingga nampak perbedaan antara satu kaidah dengan kaidah lainnya. Itulah sebabnya kitab ini terkenal dengan *al-Furûq* yang berarti pembeda. Ulama ini berasal dari kalangan madzhab Malikiyah.

c. Kalangan Ulama' Syâfi'iyah:

1. Imam Muhammad 'Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm (abad 7 H), menyusun kitab kaidah yang berjudul *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* dengan tema pokoknya adalah "Menarik manfaat dan menolak kerusakan".
2. Imam Tâjuddîn al-Subkî (w. 771 H.), seorang faqih yang hidup pada abad kedua 8 H, menyusun kitab dengan judul *al-Ashbâh Wa al-Nadhâir* yang kemudian kitab itu disempurnakan oleh Imam Jalal al-Dîn Abd al-Rahman Abi Bakr al-Suyûthî (849-911H) dengan judul yang sama.<sup>1</sup>

d. Kalangan Ulama' Hanbaliyah:

1. Najmuddîn al-Tûfî, seorang faqih yang wafat pada tahun 717 H, yang menyusun kitab berjudul *al-Qawâ'id al-Kubrâ* dan *al-Qawâ'id al-Sughrâ*.
2. Imam Abd al-Rahmân bin Rajab (w. 785 H.), menyusun sebuah kitab yang berjudul *al-Qawâ'id*.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lihat dalam Musbikin, *ibid*, 31, dan Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, 102.

<sup>2</sup> Muchlis Usman, *ibid*, 102-103.

### BAB III PANCA KAIDAH ASASIAH BESERTA CABANG-CABANGNYA

Kaidah fiqhiyah biasa dibagi menjadi kaidah-kaidah *asâsiah* dan *ghairu asâsiah*. Kaidah-kaidah *asâsiah* adalah kaidah yang disepakati yang jumlahnya ada lima atau enam. Kaidah yang lima (panca kaidah) tersebut adalah: 1) setiap perkara tergantung tujuannya, 2) keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan, 3) kesulitan itu dapat menarik kemudahan, 4) kemadharatan itu harus dihilangkan, dan 5) adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi hukum.

Sedangkan satu kaidah lagi yang disepakati oleh sebagian fuqaha adalah kaidah "tiada pahala kecuali dengan niat". Kaidah-kaidah *asasiah* tersebut kemudian diringkaskan oleh Imam Muhammad Izzuddin bin Abdis Salam dengan "menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan".<sup>1</sup>

Kaidah *ghairu asasiah* adalah kaidah di luar kaidah yang lima (enam menurut sebagian fuqaha), tetapi keabsahannya masih tetap diakui. Kaidah ini ada yang menyatakan berjumlah 19<sup>2</sup>, ada juga yang menyatakan 40 kaidah yang disepakati dan 20 kaidah yang diperselisihkan.

Di samping sistematika kaidah di atas, sebagian fuqaha

<sup>1</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 105.

<sup>2</sup> Hashbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 439.



juga ada yang mempunyai sistematika pembahasan yang berbeda tentang kaidah tersebut, yaitu sistematika pembahasan kaidah yang berdasarkan abjad, dan ada juga yang berdasarkan sistematika fiqh, misalnya berdasarkan bab ibadah, bab muamalah, dan lain-lain. Untuk mempermudah mempelajari kaidah fiqhiyah ini, maka sistematika pembahasan buku ini mengikuti sistematika yang telah lazim, yaitu dimulai dengan panca kaidah asasiyah, dilanjutkan dengan pembahasan 40 kaidah yang disepakati dan 20 kaidah yang masih diperselisihkan.

## A. Kaidah Pertama

### الأمر بمقاصد ها

Setiap perkara tergantung pada tujuannya.<sup>1</sup>

### 1. Dasar-dasar Pengambilan

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها  
(العمران : ١٤٥)

Barangsiapa yang menghendaki pahala dunia niscaya kami berikan kepadanya pahala di dunia itu, dan barangsiapa yang menghendaki pahala akhirat maka niscaya kami berikan pula pahala akhirat itu.

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء (البينه : ٥)

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.

فاعبدوا الله مخلصا له الدين (الزمر : ٢)

Maka sembahlah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya.

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى (اخرجه البخارى)

Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niat.

انما يبعث الناس على نياتهم (اخرجه ابن ماجه عن ابى هريرة)

Sesungguhnya manusia itu dibangkitkan menurut niatnya.

## 2. Uraian Niat

Perbuatan manusia itu ada tiga macam, yaitu; dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Semua amalan yang berhubungan dengan hati diterangkan dalam hadits, "segala perbuatan itu hanyalah dengan niat". Namun yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana memposisikan niat, termasuk rukun atau syarat?, dan di manakah tempat niat itu?, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'.

a. Niat itu termasuk rukun ataukah syarat ?

- 1). Imam Syâfi'î berpendapat bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat shalat misalnya termasuk dzat (esensi) shalat itu.
- 2). Imam Abû Hanîfah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa niat itu termasuk syarat, sebab kalau niat itu termasuk rukun, maka harus pula diniati. Jadi niatnya diniati.
- 3). Menurut Imam Al-Ghazali, "diperinci". Kalau puasa niat termasuk rukun; kalau shalat niat termasuk syarat.

<sup>1</sup> Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nadhâir*, (Indonesia: Dar Ihyâ, t.th.), 6.

- 4). Imam Nawawî dan Rafi'î sebaliknya; bagi shalat, niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa niat termasuk syarat.

b. Tempat niat

Niat itu tidak pada ucapan, tetapi pada hati, hanya saja karena gerakan dalam hati itu sulit maka para ulama' menganjurkan agar niat dalam hati itu dikukuhkan dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong gerakan dalam hati. Dan sebaliknya niat yang hanya diucapkan saja tanpa ada kehendak dalam hati, maka niat itu tidak sah

c. Kapan niat itu dilaksanakan?

Ada beberapa ketentuan tentang waktu niat;

- 1). Malikiyah berpendapat bahwa mendahulukan niat dalam bersuci adalah boleh. Sedangkan yang lainnya, niat itu harus bersamaan dengan permulaan ibadah, seperti; wudlu niatnya bersamaan dengan ketika membasuh muka, shalat niatnya dilakukan bersamaan dengan *takbiratul ihram*, dsb.<sup>1</sup>
- 2) Jika permulaan ibadah itu berupa dzikir, maka berbarengnya niat itu harus bersamaan dengan lengkapnya dzikir itu. Namun hal ini akan sulit dilakukan oleh orang yang masih awam. Untuk itu Imam Haramayn dan Imam al-Ghazali berpendapat, bahwa boleh niat tidak berbarengan seratus persen dengan dzikir. Bahkan sebagian ulama fiqh membolehkan niat itu mendahului atau terlambat sedikit dari dzikir.
- 3). Jika ibadah itu berupa perbuatan, maka niatnya cukup berbarengan dengan permulaan ibadah itu. Hanya saja disunnahkan untuk selalu mengingat sampai ibadah

itu selesai dikerjakan.<sup>1</sup>

d. Syarat sahnya niat

- 1). Harus Islam,
- 2). Harus *tamyîz* (sudah dapat makan, minum, dan mensucikan diri),
- 3). Harus meyakini apa yang diniati, misalnya Seseorang melakukan sholat subuh, tetapi ia masih ragu sudah masuk waktu subuh atau belum, maka niatnya batal.
- 4). Harus tidak ada *munafî*, yakni hal-hal yang membatalkan niat, seperti murtad.
- 5) Diperkirakan harus bisa melaksanakan apa yang diniati.<sup>2</sup>

e. Tujuan niat.

Tujuan utama disyariatkan niat dalam setiap ibadah adalah:

- 1). Untuk membedakan antara ibadah dan pekerjaan/perbuatan biasa.
- 2). Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain.<sup>3</sup>

### 3. Uraian Kaidah

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan diukur dengan niat si pelakunya. Untuk mengetahui sejauh manakah niat si pelakunya itu, haruslah diketahui melalui *qarinah-qarinah* yang dapat dijadikan alat untuk mengetahui macam niat pelakunya.

Apabila terjadi perlawanan antara makna ucapan dengan perkataannya, maka yang dipandang adalah maknanya bukan

<sup>1</sup> Jath Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 125. Lihat juga dalam Abu Bakar bin Abu Qasim al-Ahdal, *terjemah al-Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa'id Fiqh*, terj. Moh. Adib Bisri, (TK: Menara Kudus, 1977), 3

<sup>1</sup> Abu Bakar, *al-Faraid al-Bahiyyah*, 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

ucapannya. Hal ini apabila tidak bertalian dengan hak orang lain. Jika bertalian dengan hak orang lain, maka yang dipegang adalah lafadhnya bukan maknanya.

#### 4. Kaidah-kaidah yang dapat diambil dari kaidah pokok di atas.

##### لا ثواب إلا بالنية

*Tidak ada pahala kecuali dengan niat (terhadap perbuatan yang diperbuat itu).*

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah pokok yang enam yang telah dirumuskan oleh Zainal-Abidin ibn Ibrahim al-Mishri (926-970 H), kemudian oleh para ulama' selanjutnya hanya diambil yang lima saja. Kaidah ini memberi pedoman kepada kita untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang tidak bernilai ibadah, baik ibadah yang *mahdlah* maupun yang *'ammah*. Menurut al-Nawawi, yang membedakan antara ibadat dengan adat hanyalah dengan niat. Untuk itu apabila suatu perbuatan adat diniatkan untuk mengikuti tuntutan Allah dan Rasulullah, maka ia berubah menjadi ibadah yang berpahala<sup>1</sup>

##### العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

*Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud, bukan lafadh-lafadh dan bentuk-bentuk perkataan.*<sup>2</sup>

Contoh dari kaidah ini adalah, bila dua orang mengadakan suatu akad dengan lafadh memberi barang, tetapi dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu, maka akad ini dipandang sebagai akad jual beli. Sebab, akad yang terakhir ini adalah yang

ditunjukkan oleh maksud dan makna si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadh.

Mengenai orang yang mengucapkan akad dengan bermain-main maka;

- Menurut al-Syâfi'î dalam salah satu pendapatnya, Ahmad dan sebagian ulama' Malikiyah, menganggap perkataan itu sebagai sesuatu hal yang sia-sia, dan tidak menimbulkan akad karenanya.
- Pendapat al-Syâfi'î yang lain, perkataan itu dianggap sah dan terjadi akad karenanya.
- Golongan Hanbaliyah dan jumhur ulama Malikiyah, menganggap akad itu juga sah, tetapi hanya pada lima macam akad, yaitu; nikah, *thalaq*, rujuk, sumpah dan memerdekakan budak. Sebab dalam hal itu hak Allah yang ajaib dipelihara dari senda gurau.
- Ulama Hanafiyah berpendapat, perkataan itu dianggap sah pada lima macam akad itu, apabila berkaitan dengan keridlaan yang benar untuk melangsungkan akad, sesudah terjadinya perkataan yang pura-pura itu.<sup>1</sup>

Untuk akad yang terjadi karena adanya pemaksaan, menurut jumhur fuqaha', tidak dihargai perkataannya dalam semua akad, sebab ia tidak mengucapkan *iradat*-nya yang benar. Dan menurut ulama Hanafiah, perkataan orang yang dipaksa itu, sama dengan orang yang bermain-main saja. Sedangkan untuk akad yang diucapkan oleh seseorang dengan sengaja dan ia mengerti maknannya, tetapi ia berpura-pura/ main-main, maka para ulama menghargai ucapannya itu. Dan perkataannya diterapkan pada makna yang hakiki selama tidak ada *qar'nah* yang menyertainya, dan memalingkannya kepada makna majazi. Misalnya: perkataan seseorang, "aku hibahkan barang

1 Imām Abū Zakariya Yahyā ibn Syarf al-Nawāwī, *Riyāḍ al-Shālihīn*, terj. Salim Bahreisy, jilid 1, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989.), 11.

2 Abdul Mujib, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), 24

1 Mushikin, *Qawā'id*, 45.

ini dengan harga Rp. 100.000,- “, maka penjualannya dianggap sah dan tidak dipandang sebagai hibah.

### ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل

Dalam amal yang disyaratkan menyatakan ta'yin, maka kekeliruan pernyataan ta'yin membatalkan amalnya.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, apabila seseorang salah dalam menyebutkan rincian spesifikasi ibadah yang memang perlu ta'yin, maka ibadah itu menjadi batal. Misalnya, seseorang menjalankan shalat dhuhur tetapi niatnya shalat ashar, maka shalatnya tidak sah.

### مقاصد اللفظ على نية اللفظ

Maksud perkataan itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya.<sup>2</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, ucapan seseorang itu tergantung dari maksud orang itu sendiri. Misalnya orang yang dalam keadaan *junub* mengatakan;

### انا لله وانا اليه راجعون

Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kita akan kembali.

Apabila dalam mengucapkan itu, ia berniat dzikir karena datangnya musibah, hukumnya tidak haram, tetapi bila ia mengucapkan dengan niat membaca al-Qur'an, hukumnya haram. Hal semacam ini maksud perkataan tergantung niat orang yang mengatakan, kecuali kalimat sumpah yang diucapkan di hadapan hakim. Sebab maksud dari kata-kata dalam sumpah di

1 Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Auwaliah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t), 23. Ta'yin adalah menyebutkan ciri ibadah secara terinci.

2 Al-Suyuthi, *Al-Asybah*, 32.

hadapan hakim adalah terserah kepada hakim. Sesuai dengan hadits Nabi SAW.

### اليمين على نية المستخلف (رواه مسلم عن ابي هريرة)

Sumpah itu menurut maksud/ niat orang yang menyumpah.

Contohnya, “Demi Allah, saya tidak makan harta anak yatim”, meskipun ketika mengucapkannya, ia meniatkan “tidak makan harta” dengan arti harfiah, namun yang diperhitungkan adalah niat hakim yang juga mengartikan kata “makan harta” dengan “menggunakan”, sehingga ia dianggap melanggar sumpah, apabila menggunakan harta itu untuk kepentingannya.

### مالا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا اذا عينه واخطأ لم يضر

Sesungguhnya (perbuatan) yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan cirinya, baik secara global, maupun secara terperinci, maka kekeliruan menyebut ciri itu tidak membahayakan (tidak membatalkan).<sup>1</sup>

Dari kaidah ini dapat diambil contoh: apabila seorang imam shalat menyatakan Muhammad sebagai makmumnya, padahal makmum yang di belakangnya adalah Mahmud, maka jama'ahnya tidak batal. Sebab seorang imam tidak harus menyatakan niatnya sebagai imam. Atau contoh lain, seseorang shalat dhuhur dengan menyatakan niatnya di Ponorogo, padahal ia shalat di Madiun, maka sembahyangnya tidak batal. Sebab tidak wajib menyebutkan tempat dalam shalat.

### ما يشترط التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا اذا عينه واخطأ ضر

Suatu (amalan) yang harus dijelaskan cirinya secara garis besarnya dan tidak disyaratkan secara terperinci, kemudian disebutkan secara terperinci dan rinciannya ternyata salah maka membahayakan.<sup>2</sup>

1 Hakim, *Mabadi Auwaliah*, 24.

2 Ibid, 23.



Misalnya, orang yang berjama'ah dengan niatan menjadi makmum pada Ahmad, tetapi yang menjadi imam ternyata Mahmud, maka shalat jamaahnya tidak sah. Sebagaimana juga orang yang shalat jenazah yang berniat menshalati mayat laki-laki, ternyata mayatnya perempuan, maka shalat jenazahnya tidak sah.

### النّية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص

Niat dalam sumpah mengkhususkan lafadh yang umum, dan tidak pula menjadikan umumnya pada lafadh yang khusus.<sup>1</sup>

Contohnya: Apabila seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang, kemudian seseorang itu disebut namanya adalah Hanbali, maka sumpah itu hanya berlaku pada Hanbali saja, tidak pada orang lain.

### المنقطع عن الجماعة لعذر من اعذارها اذا نوى حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها

Seseorang yang tidak dapat melaksanakan Jama'ah karena sesuatu halangan, padahal ia berniat untuk melakukannya andaikan tidak ada halangan, maka ia mendapatkan pahala jama'ah.<sup>2</sup>

Kaidah tersebut berkaitan dengan hadits Nabi:

### اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان صحيحا مقبلا

Apabila seorang sakit atau bepergian maka ia dianggap beramal sebagaimana ia dalam keadaan sehat atau tetap di rumah. (HR. Bukhari dari Abu Musa)

Dari kaidah di atas dapat diambil pengertian, seseorang yang telah berniat melakukan suatu ibadah, tetapi kemudian

karena suatu halangan ia terpaksa tidak dapat melakukannya, maka itu sudah tercatat sebagai pahala.

## B. Kaidah Kedua

### اليقين لا يزال بالشك

Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan.<sup>1</sup>

#### 1. Dasar Pengambilan

الدليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشك عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu tersebut keluar dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid, sehingga ia mendengarkan suara atau mencium bau.

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أو أربعا فليطرح الشك واليقين على ما استيقن (رواه الترمذی عن عبد الرحمن)

Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam mengerjakan shalat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan tiga ataukah empat rakaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah pada apa yang diyakini (yang paling sedikit). (HR. Turmudzi dari Abd al-rahman).

#### 2. Uraian Kaidah

Yang dimaksud dengan "yakin" adalah:

### اليقين هو ما كان ثابتا بالنظر أو الدليل

Sesuatu yang menjadi tetap baik dengan penganalisaan atau dengan

<sup>1</sup> Al-Suyūthī, Al-Asybah, 32.

<sup>2</sup> Ibid, 35

<sup>1</sup> Al-Suyūthī, Al-Asybah, 37.



adanya dalil.<sup>1</sup>

Maksudnya, seseorang boleh meyakini sesuatu apabila ada bukti yang telah ditetapkan oleh panca indera atau dalil. Misalnya, orang yang hadats dari wudlunya, dapat diyakini hadatsnya itu dengan keluarnya angin dari dubur yang dapat dirasakan oleh kulit, dapat didengar suaranya oleh telinga dan dapat dicium baunya oleh hidung. Jadi apabila tidak ada bukti batal, maka ia tetap dalam wudlunya.

Begitu juga seseorang yang ragu dalam jumlah rakaat shalat, apakah ia telah melaksanakan tiga atau empat rakaat, maka yang yakin adalah yang sedikit jumlahnya, karena yang sedikit itu yang paling meyakinkan sedangkan yang banyak yang masih diragukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *syak* adalah:

الشك هو مكان مترددا بين الثبوت وعدمه مع تساوى طرفى الصواب والخطأ دون ترجيح أحدهما على الآخر

Sesungguhnya pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat ditarjihkan salah satunya.<sup>2</sup>

Menurut para fuqaha', *dhan* (dugaan) dan keraguan (*syak*) mempunyai arti yang sama. Al-Nawawi mengatakan: "ketahuilah bahwa menurut sahabat-sahabat kami yang dimaksud *syak* adalah dalam hal air, hadats, najis, sakit, dan sebagainya. *Syak* merupakan ketidakpastian antara ada dan tidaknya sesuatu, baik dua sisi yang tidak pasti itu sama, atau hanya salah satunya saja yang unggul". Sedangkan ulama' ushul fiqh membedakan antara *syak* dan *dhan*, yaitu: "jika ketidakpastian (*al-taradud*) pada dua sisi itu sama, maka itulah *syak*. Tetapi jika salah satu-

nya saja yang unggul, maka sisi yang unggul itu adalah *dhan* dan sisi yang tidak unggul itu adalah fantasi (*wahm*)".

*Syak* menurut al-Syaykh al-Imam Abu Hamid al-Asfirayni ada tiga macam :

- Keragu-raguan yang berasal dari barang haram,
- Keragu-raguan yang berasal dari mubah, misalnya: ada air yang berubah, yang mungkin disebabkan oleh najis dan mungkin karena terlalu lama tergenang, maka air itu dianggap suci, karena pada dasarnya air itu suci.
- Keragu-raguan terhadap sesuatu yang tidak diketahui asalnya atau keragu-raguan yang pangkalnya diragukan, misalnya: bekerja sama dengan seseorang yang mempunyai modal yang sebagian halal dan haram, antara modal yang haram dan yang halal itu sulit untuk dibedakan. Menurut pendapat ulama hukumnya adalah makruh.<sup>1</sup>
- Cabang-cabang Kaidah

### الأصل بقاء ما كان على ما كان

Yang menjadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula.<sup>2</sup>

Kaidah ini diambil dari hadits Nabi:

### الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره

Pada asalnya sesuatu itu tetap menurut adanya, sehingga terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.<sup>3</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, keadaan di masa lalu masih dianggap berlaku, sampai ada yang mengubahnya. Jadi, bila seseorang ragu terhadap hukum suatu perkara, maka ha-

1 Mujib Abdul Mudjib, *Al-Qawa'id Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), 25-26.

2 Pengertian ini menurut ulama' ushul fiqh, Ibid.

1 Mubtikan, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, 52-53.

2 Al-Suyuthi, *Al-Asybah*, 37

3 Zainal Abidin Ahmad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975.), 183.

rus dikembalikan pada hukum yang telah ada, karena apa yang telah ada lebih dapat diyakini, kecuali apabila sudah ada ketentuan baru yang mengubahnya. Misalnya, apabila telah terjadi perselisihan antara dua orang dalam hal pelunasan hutang piutang, apakah sudah dilunasi atau belum, maka hutang tersebut dianggap tetap ada, karena belum ada bukti pelunasan. Dan hal itu dapat berubah apabila telah ada bukti-bukti baru atas pelunasan hutang tersebut.

### الأصل براءة الذمه

*Hukum dasar adalah kebebasan seseorang dari tanggung jawab.<sup>1</sup>*

Kaidah ini sesuai dengan kodrat manusia, bahwa ia lahir dalam keadaan bebas belum mempunyai tanggungan apa pun, makhluk suci yang tidak terbebani oleh dosa waris atau dosa akibat perbuatan orang tuanya. Untuk itu para ulama berpendapat bahwa anak buangan yang diketemukan orang dipandang anak merdeka, bukan anak budak, sebab kemerdekaannya itu menjadi asal. Sebagaimana hadits Nabi SAW,

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه  
أو ينصرانه أو يمجسانه

Semua anak dilahirkan atas dasar kesucian/kebersihan (dari segala noda/dosa) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. (Hadits riwayat Abu Ya'la, al-Thabrani, dan al-Bayhaqi dari al-Aswad bin Sari').<sup>2</sup>

Dan berdasarkan Firman Allah SWT;

لا تزر وازرة وزر أخرى (النجم : ٣٨)

1 Al-Suyuthi, Al-Asybah, 39.

2 Al-Suyuthi, Al-Jami' al-Shaghir, vol. II, (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, Cairo, 1954.), 17.

Bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS.al-Najm: 38).

Contoh lain, Ahmad mengadukan Rizal, Bahwa Rizal berhutang kepadanya Rp.100.000,-, tetapi pengaduan tersebut tidak disertai dengan bukti maupun saksi, sedang Rizal (yang diadukan) menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak merasa berhutang. Maka menurut hukum, pengaduan Ahmad tertolak berdasar kaidah ini.

### الأصل العدم

*Asal dari segala hukum adalah tidak ada.<sup>1</sup>*

Contohnya, jika terjadi perselisihan dalam hal kerja sama mudlarabah, yaitu A memberikan modal kepada B Rp.1.000.000,- dengan perjanjian laba di bagi bersama, kemudian tiba-tiba A menuduh B telah mendapatkan laba dan dihabiskan sendiri tetapi tuduhan A tersebut tanpa ada buktinya dan B menyangkal tuduhan itu. Maka penyelesaiannya menurut kaidah ini yang dibenarkan adalah B yang menyatakan belum ada keuntungan. Sebab pada dasarnya adalah tidak ada.

### الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>2</sup>*

Kaidah di atas menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut madzhab Hanafi adalah sebaliknya, yaitu :

### الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

*Segala sesuatu pada dasarnya adalah haram, sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehan.<sup>3</sup>*

1 Al-Suyuthi, al-Asybah, 42.

2 Al-Suyuthi, Al-Asybah, 43

3 Ibid.

Apabila dicermati kaidah tersebut yang lebih absah adalah kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, karena kaidah tersebut sesuai dengan asas filosofi tasyri' Islam, yakni tidak membebankan dan tidak banyak beban. Menurut Imam Syafi'i, "Allah itu Maha Bijaksana, jadi mustahil Allah menciptakan sesuatu, lalu mengharamkan atas hamba-Nya". Beliau berpegang kepada dalil:

هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا

Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu.

ما حلال الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو  
فأقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئا (أخرجه البراز  
والطبراني عن أبى الدرداء)

Apa yang telah dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang telah diharamkan oleh Allah adalah haram, sedang yang tidak disinggung adalah dima'afkan, maka terimalah kema'afan itu sebagai (kurnia) dari Allah, sesungguhnya Allah tidak lupa akan sesuatu.

Walaupun kedua kaidah itu bertentangan, namun dapat dikompromikan, yakni meletakkan dan menggunakan kedua kaidah itu sesuai dengan proporsinya. Kaidah pertama lebih tepat digunakan untuk masalah mu'amalah dan masalah keduniaan, sedangkan kaidah kedua untuk masalah ibadah. Misalnya, anjing haram dimakan sedang ikan halal dimakan, karena keduanya telah jelas nashnya, sedangkan untuk makanan yang tidak ada nashnya maka kaidah yang cocok adalah kaidah yang pertama yakni makanan itu halal/boleh. Untuk masalah ibadah tidak boleh melakukan kecuali apabila ada perintah, hal ini sesuai dengan kaidah :

الأصل فى العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الأمر

Hukum pokok dalam lapangan ibadah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.<sup>128</sup>

Kaidah di atas ini diambil dari firman Allah SWT, surat al-Syûrâ: 21, yaitu:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah (QS. al-Syûrâ: 21).

Kaidah di atas juga senada dengan kaidah :

الأصل فى العبادة التوفيق والاتباع

Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Jadi dalam hal ibadah, apa yang telah ditetapkan itulah yang seharusnya dilakukan. Misalnya, jumlah rakaat shalat maghrib 3 rakaat maka tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, tetap 3 itu yang dibenarkan.

الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمنه

Pada asalnya setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat.<sup>3</sup>

Contohnya, seorang dokter mengoperasi seorang ibu untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya, kemudian operasi tersebut berhasil dengan selamat. Setelah ada satu minggu bayi itu meninggal, maka dokter tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya. Sebab kematiannya belum tentu karena dokter itu, bisa jadi karena sebab lain yang lebih dekat dengan kematiannya.

<sup>1</sup> Ibid, 44.

<sup>2</sup> Hakim, Mabâdi, 188.

<sup>3</sup> Al-Suyûthi, Al-Asyâh, 43.

### من شك أفعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعله

Barang siapa yang ragu-ragu apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka pada dasarnya dianggap belum melakukannya.<sup>1</sup>

Misalnya, seseorang ragu sudah berwudlu atau belum, maka yang dimenangkan adalah belum berwudlu. Sebab asalnya ia belum berwudlu. Contoh lainnya, A mengadukan bahwa B telah berhutang kepadanya Rp.1.000.000,-. Kemudian B mengatakan bahwa hutang itu telah dilunasinya, tetapi B tidak mempunyai bukti pembayarannya. Maka yang dimenangkan dalam kasus ini adalah A, yaitu B masih berhutang dan belum dilunasi.

### من يتيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل

Jika seseorang telah yakin berbuat (sesuatu), tetapi ia ragu tentang banyak sedikitnya, maka yang dihitung adalah yang sedikit.<sup>2</sup>

Contoh yang bisa diambil dari kaidah ini adalah, bila seseorang sedang shalat dhuhur ragu tentang jumlah rakaatnya sudah mendapatkan empat atau tiga, maka yang dimenangkan menurut kaidah ini adalah tiga, karena yang sedikit itulah yang telah diyakini.

### الأصل في اكلام الحقيقة

Hukum asal dalam memahami kalimat adalah makna hakikat.<sup>3</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, makna kalimat pertama harus makna hakikatnya/makna yang sebenarnya (makna *fi'il*-nya). Apabila terjadi suatu perselisihan di dalam menafsirkan

<sup>1</sup> Ibid, 40.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid, 45.

atau mengartikan suatu kalimat yang memungkinkan untuk diartikan menurut *majaz* (makna metafor) atau hakikat (makna harfiah), maka yang dijadikan pedoman adalah penafsiran menurut arti hakikat *lafadh* itu sendiri. Misalnya, seseorang mengatakan: "Aku akan mewakafkan sebagian hartaku ini untuk anak si Ahmad". Maka dalam hal ini perkataan "anak" harus diartikan anak dalam arti yang sebenarnya (riil), bukan berarti "cucu" dan sebagainya.

### الأصل في الإبضاء التحريم

Hukum asal tentang seks adalah haram.<sup>1</sup>

Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan seks adalah haram, kecuali ada sebab yang memperbolehkannya, misalnya dengan akad nikah (perkawinan). Misalnya, A ingin menikahi wanita dari kampung Betawi, tetapi di kampung ini ada salah satu wanita yang masih muhrimnya, dan A tidak bisa memilih mana wanita yang muhrim dan bukan muhrimnya. Maka dalam hal ini, A tidak diperbolehkan menikahi wanita dari kampung Betawi tersebut hingga jelas siapa muhrimnya di kampung ini.

### C. Kaidah Ketiga

#### المشقة تجلب التيسير

Kesukaran itu dapat menarik kemudahan.<sup>2</sup>

#### 1. Dasar Pengambilan Kaidah

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة : ١٨٥)

<sup>1</sup> Ibid, 44, lihat juga dalam Hakim, *Mabadi*, 36.

<sup>2</sup> Ibid, 55.



Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. (QS. al-Baqarah: 185)

وما جعل لكم في الدين من حرج (الحج: ٧٨)

Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesulitan. (QS. al-Hajj: 78)

الدين يسر احب الدين الى الله الحنيفية السمحة (رواه البخري)

Agama itu mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

بعثت بالحنيفية السمحة (رواه احمد عن ابن عباس)

Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah. (HR. Ahmad dari Ibn Abbas)

## 2. Uraian Kaidah

Syari'ah dibuat agar kehidupan manusia bisa teratur dan kemaslahatannya bisa terealisasi, untuk itu syari'ah itu telah disesuaikan dengan kemampuan manusia, karena pada dasarnya syari'ah itu bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.

Untuk merealisasikan syari'ah tersebut, Allah SWT. memberikan 5 alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu positif (*wajib*), cenderung ke positif (*sunnah*), netral (*mubah*), cenderung ke negatif (*makruh*) dan negatif (*haram*). Dan untuk merealisasikan kelima alternatif tersebut, Allah SWT. juga memberikan hukuman keharusan ('*azimah*) yaitu keharusan untuk melakukan perbuatan yang positif dan sebaliknya. Akan tetapi tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia mengingat

kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Untuk itu Allah SWT. memberikan hukum *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga bisa dikatakan antara hukum '*azimah* dengan kebolehan melakukan *rukhsah* itu seimbang.<sup>1</sup>

Menurut al-Syatibi, kesulitan itu dihilangkan karena dua sebab. Pertama, karena khawatir orang (*mukallaf*) akan terputuskan ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan adanya kerusakan bagi orang mukallaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada hakikatnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. Kedua, karena takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, baik terhadap keluarga dan masyarakat. Karena hubungan manusia dengan sesama manusia itu juga termasuk ibadah pula.<sup>2</sup>

Mengenai klasifikasi kesulitan, Dr. Wahbah al-Zuhayli membaginya dalam 2 kategori, yaitu:

1. Kesulitan *mu'tadah*, yaitu kesulitan yang alami, di mana manusia sewajarnya mencari jalan keluarnya. Misalnya seseorang kesulitan mencari pekerjaan, ia dapat pekerjaan yang sangat berat, keberatan itu bukan berarti ia boleh tidak mencari pekerjaan.
2. Kesulitan *ghayr mu'tadah*, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan, karena jika ia melakukannya niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Kesulitan semacam itu diperbolehkan menggunakan dispensasi (*rukhsah*). Misalnya, diperbolehkan salat *khauf* bagi mereka yang se-

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Nadhariyat al-Dinariyah al-Syar'iyah*, (Beirut: Muassasah Risalah 1982.), 40. Lihat juga dalam Usman, *Kaidah-Kaidah Ushululiyah*, 124-125.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Nadhariyat*, 195-196.

dang berperang.<sup>1</sup>

Menurut Abd al-Rahman al-Suyuthî, ada 7 macam sebab orang memperoleh keringanan yaitu:

1. Karena *safar* (bepergian), diperbolehkan mengqashar shalat, berbuka puasa, dll.
2. Karena sakit, diperbolehkan tayammum, tidak puasa, dll.
3. Karena *ikrah* (terpaksa dan dipaksa), karena tidak ada makanan apa pun kecuali daging babi dan kelaparan (kalau tidak makan bisa mati), diperbolehkan makan daging babi.
4. Karena *nisyan* (lupa), karena lupa pada saat puasa maka dan minum, ini *dima'fu*.
5. Karena *jahl* (bodoh), atau buta hukum.
6. Karena *'usr* (kesulitan) dan *umûmu al-balwâ* (kesulitan yang umum), misalnya debu di jalan yang bercampur dengan kotoran, pada hakekatnya itu adalah najis. Tetapi karena itu sulit untuk dihindari maka hukumnya *dima'fu*.
7. Karena *naqish* (kekurangan), misalnya anak kecil dan orang gila mereka tidak mendapatkan beban hukum.<sup>2</sup>

Sedangkan bentuk-bentuk keringanan ada enam, yaitu :

1. Keringanan pengguguran, misalnya ibadah haji itu menjadi tidak wajib/gugur kewajibannya bagi orang mampu, karena kondisi tidak aman, dan membahayakan jiwanya.
2. Keringanan pengurangan, misalnya diperbolehkan melakukan shalat *qashar* ketika dalam bepergian/ *safar*.
3. Keringanan penggantian, misalnya dalam kondisi sakit ti-

1 Ibid., 199-200. Kesulitan *ghairu al-mu'tadah* ini terbagi menjadi tiga yaitu: 1) kesulitan yang tidak bisa ditanggung oleh manusia, misalnya kesulitan yang mengancam jiwa atau anggota badannya, 2) kesulitan yang sedang, yang kadarnya dipertimbangkan pada diri sendiri, misalnya sakit tentang kadar sakit sehingga harus membatalkan puasa, maka yang mengetahui kadar ia boleh berbuka atau tetap berpuasa adalah dirinya sendiri, 3) kesulitan yang ringan dan tidak menyebabkan mendapat keringanan, misalnya sakit pusing biasa atau gatal-gatal, dll.

2 Al-Suyuthî, *Al-Asybah*, 55-57, lihat juga dalam Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, 129.

dak boleh menyentuh air, wudlunya boleh diganti dengan tayammum.

4. Keringanan mendahulukan, misalnya *jama' taqdim*.
5. Keringanan mengakhirkan, misalnya *jama' ta'khir*.
6. Keringanan kemurahan, dalam kondisi sangat lapar kalau tidak makan bisa mati, sedangkan makanan yang ada hanyalah daging babi, maka itu boleh dimakan.<sup>1</sup>

### 3. Cabang-Cabang Kaidah

#### إذا ضاق الأمر اتسع

Apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas.<sup>2</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah yang dibuat oleh al-Syafi'i. Maksud dari kaidah ini adalah apabila sesuatu itu ada kesempitan/kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini "wilayah-wilayah" yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, sehingga "wilayah-wilayahnya" menjadi luas. Misalnya seseorang dalam perjalanan, ia tidak mendapatkan makanan apapun kecuali daging babi. Apabila ia tidak memakannya, ia akan mati kelaparan (karena beberapa hari tidak makan), tapi bila ia memakannya itu diharamkan. Maka dalam keadaan sulit semacam itu ia diperbolehkan makan daging babi itu.

#### إذا اتسع الأمر ضاق

Jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit.<sup>3</sup>

Kaidah ini merupakan kebalikan dari kaidah di atas.

1 Al-Suyuthî, *Al-Asybah*, 59.

2 Ibid.

3 Ibid.

Maksudnya, bila dalam kondisi sempit/mendesak, maka hukumnya menjadi luas akan tetapi bila keadaan tidak mendesak/sudah normal kembali, maka hukumnya kembali pada keadaan semula (sempit). Misalnya setelah seseorang itu sampai di tempat tujuan, dan di sana sudah banyak makanan, maka daging babi (makanan yang haram) yang asalnya itu boleh dalam kondisi terpaksa/sempit, menjadi haram kembali.

Dua kaidah di atas oleh Imam al-Ghazali digabungkan menjadi satu, yaitu:

كل ما تجاوز حده انعكس الى ضده

Semua yang melampaui batas, maka (hukumnya) berbalik kepada kebalikannya.<sup>1</sup>

Misalnya, dalam keadaan biasa pada dasarnya saksi adalah seorang laki-laki yang terpercaya, namun apabila tiada laki-laki sama sekali, maka boleh digantikan pada wanita atau bahkan anak kecil. Tetapi bila dalam kondisi memungkinkan saksi harus laki-laki.

## D. Kaidah Keempat

الضرر يزال

Madllarat itu dapat dihapus.<sup>2</sup>

### 1. Dasar Pengambilan

ان الله لا يحب المفسدين (القصص: ٧٧)

Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. (QS. al-Qashash : 77).

ولا تفسدوا في الارض (الاعراف : ٥٥)

Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan dimuka bumi. (QS. al-A'raf: 55).

لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (رواه مالك وابن ماجه والدارقطني)

Tidak boleh memberi madllarat kepada orang lain dan tak boleh membalas kemadllaratan dengan kemadllaratan di dalam-Islam. (HR. Malik, Ibn Mâjah dan al-Dâruquthnî).

### 2. Uraian Kaidah

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat populer di dalam lapangan fiqh, dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting, dan banyak kasus fiqh yang dikembalikan kepadanya. *Dlarurat* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Sedangkan *masyaqqat* adalah kesulitan yang timbul dari hasil mengerjakan sesuatu perbuatan, di luar dari kebiasaan.<sup>146</sup> *Masyaqqat* akan mendatangkan hokum *rukhsah*/kemudahan bagi manusia dan *dlarurah* menyebabkan adanya penghapusan hukum. Contoh dari *dlarurat* adalah, seseorang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Kemudian tidak ada makanan kecuali makanan yang haram, maka dia harus makan makanan yang haram itu untuk menyelamatkan jiwanya. Sedangkan contoh dari *masyaqqat* adalah, seseorang yang bepergian jauh, maka ia mendapatkan *rukhsah jama'* shalat atau tidak berpuasa.

1 Ibid.

2 Ibid.

1 Al-Zuhayli, Nadharyat, 218.

## 3. Cabang-cabang Kaidah

## الضرورات تبيح المحظورات

Kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.<sup>1</sup>

Kaidah ini telah dikonfirmasi dengan ayat :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة: ١٧٣)

Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. (QS. al-Baqarah: 173).

Menurut kaidah ini, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan sesuatu yang haram, tetapi keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dan apabila itu tidak dilakukan bisa membahayakan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini, semua yang diharamkan menjadi dihalalkan. Misalnya seseorang yang kelaparan, sedang ia tidak mendapatkan makanan selain makanan yang haram. Dan kelaparan itu bisa membahayakan jiwanya. Atau juga pada suatu daerah yang belum ada dokter wanitanya, maka dokter laki-laki diperbolehkan mengobati pasien wanita.

Menurut Abd al-Qadir Awdah, seseorang itu dikatakan dlarurat dan boleh mengambil kemudahan apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikawatirkan dapat membahayakan nyawanya atau anggota-anggota tubuhnya.
2. Keadaan yang sudah mendesak, sehingga tidak bisa ditunda-tunda lagi.
3. Untuk mengatasi dlarurat itu tidak ada jalan keluar kecuali melakukan pelanggaran/ kejahatan.

4. Keadaan yang dlarurat itu hanya boleh diatasi dengan mengambil seperlunya saja (sekedar mempertahankan hidup).<sup>1</sup>

Adapun tingkatan-tingkatan kebutuhan/keterdesakan menurut kaidah ini ada lima macam yaitu:

1. Keadaan dlarurat, yang apabila seseorang tidak segera mendapatkan pertolongan, maka diperkirakan akan bisa mati.
2. *Hâjat*, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera ditolong akan mengalami kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan mati. Keadaan seperti ini tidak bisa menghalalkan barang yang haram. Misalnya dalam keadaan sakit biasa dan dalam safar seseorang kesulitan untuk melakukan puasa, maka ia boleh berbuka puasa saja, tetapi tidak diperkenankan memakan makanan yang haram.
3. Manfaat: yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur mayur, dsb.
4. *Zimah*: yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang akan kemewahan.
5. *Fudhul*: yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan dapat mendatangkan kemaksiatan/ keharaman.<sup>2</sup>

*Masyaqqat* pada tingkat-tingkat 3, 4, dan 5, bukan termasuk pada kesulitan-kesulitan yang menyebabkan seseorang mendapatkan kemudahan.

<sup>1</sup> Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami Muqarraran bi al-Qamân al-Wadl'i*, (Cairo Dar al-Nasyr al-Tsaqafah, 1949), 577.

<sup>2</sup> Al-Suyûthi, *Al-Asybah*, 61.



### الضرر لا يزال بالضرر

*Madlarat itu tidak dapat dihilangkan dengan madlarat.<sup>1</sup>*

Menurut kaidah ini, seseorang dilarang menghilangkan kemadlaratan dengan mendatangkan kemadlaratan yang sama kualitasnya atau lebih besar. Misalnya dua orang terapung di tengah laut, karena kapal yang ditumpanginya pecah. Salah seorang dari mereka mendapatkan papan yang bisa ditumpanginya sampai ia mendapatkan kapal penyelamat, tetapi papan itu tidak bisa menampung dua orang. Kemudian seseorang yang tidak mendapatkan papan itu merebut papan dan mengorbankan nyawa temannya demi mempertahankan hidupnya. Maka tindakan merebut karena darurat terhadap sesuatu yang dianggap darurat pula oleh kawannya, tidak dibenarkan oleh syara'. Tetapi apabila terjadi dua madlarat, yang satu madlarat lebih ringan maka diselesaikan menurut kaidah berikut ini.

### الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

*Kemadlaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadlaratan yang lebih ringan.<sup>2</sup>*

Seseorang yang dalam keadaan sulit atau mendapatkan kemadlaratan tidak boleh menghilangkan dengan kemadlaratan serupa. Tetapi apabila ia tetap saja tidak bisa menghindari madlarat itu maka supaya dicari madlarat yang lebih ringan. Contoh yang dapat diambil dari kaidah ini adalah: seorang dokter yang menangani pasiennya seorang ibu yang hamil mengalami kesulitan untuk menyelamatkan ibu dan anak yang ada dalam kandungan. Jalan satu-satunya harus dikorbankan salah satu-

<sup>1</sup> Ibid.

<sup>2</sup> Musbikin, *Qawá'id*, 79.

ya, dan dalam hal ini dokter harus menyelamatkan jiwa ibunya ketimbang anak yang masih berada dalam kandungan. Karena jiwa ibu lebih utama, dan sudah pasti hidupnya. Tetapi apabila kemadlaratan itu sebanding maka tidak boleh dihilangkan salah satunya,

### الضرر لا يزال بمثله

*Kemadlaratan tidak boleh dihilangkan dengan menghilangkan kemadlaratan yang sebanding.<sup>1</sup>*

Menurut kaidah ini, seorang dokter tidak boleh mengam-bil darah seorang pasien A untuk pasien B. Padahal darah itu sangat dibutuhkan oleh pasien A. Maka hal itu tidak boleh dilakukan.

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.<sup>2</sup>*

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat ada mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar ke mana-mana, dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Misalnya minuman khamr itu ada manfaatnya, tetapi mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya, maka minuman itu dilarang/ diharamkan.

## E. Kaidah Kelima

### العادة محكمة

*Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Ibid, 80.

<sup>2</sup> Al-Suyūthi, *al-Asybah*, 62.

<sup>3</sup> Ibid, 63.

## 1. Dasar Pengambilan Kaidah

وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (الاعرف: ٩٩١)

Dan serulah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh. (QS. al-A'raf: 199).

وعاشروهن بالمعروف

Dan pergaulilah mereka secara patut.

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه احمد عن ابن مسعود)

Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka baik pula bagi Allah.

## 2. Uraian kaidah

Istilah *al-'adah* dan *'urf* menurut jumhur ulama' mempunyai arti yang sama, namun sebagian fuqaha' berpendapat berbeda. Adapun pengertian masing-masing adalah :

العادة متعارفه الناس فاسيح مألوفالهم سائغا في مجرى حياتهم سواء كان قولاً ام فعلاً

*Al-'adah* adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>1</sup>

العرف هو متعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة

'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama' syari'at tidak ada perbedaan

antara 'urf dengan adat.<sup>1</sup>

Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>2</sup>

## 3. Cabang-cabang Kaidah

ماورد به الشرع مطلقاً ولاضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

Sesuatu yang disampaikan oleh syara' (hukum) secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada 'urf.<sup>3</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, apabila suatu hukum yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak, tetapi tidak ada pembatasannya dalam syara' maupun ketentuan bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf. Misalnya, hukum syari'ah menetapkan adanya hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyak mahar itu harus dibayarkan, maka ketentuan itu dikembalikan pada kebiasaan.

1 Mushikin, Qawa'id, 93.

1 Ibid.  
Musfik Zuhdi, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Hajimasagung, 1990), 24.  
Hakim, Mubaddi, 37

### المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص

Sesuatu yang telah terkenal menurut 'urf, seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat, apa yang sudah ditetapkan dengan 'urf itu seperti ketetapan dengan Nash.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya, adat itu mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana ketetapan nash. Misalnya, jual beli mobil harus ada uang atau jaminannya, karena itu sudah menjadi kebiasaannya.

## BAB IV EMPAT PULUH KAIDAH-KAIDAH UMUM (KULLĪYAH) YANG DISEPAKATI

### A. Pendahuluan

Kaidah-kaidah *kullīyah* merupakan kaidah yang bersifat umum yang oleh karena itu dapat menampung seluruh bagian-bagiannya (cabang-cabangnya) secara terperinci. Namun masih ada pula masalah-masalah yang dikecualikan dari kaidah-kaidah *kullīyah* ini, untuk itu sebagian ulama' menyebutkan kaidah-kaidah *kullīyah* ini sebagai "kaidah aghlabīyah" (kaidah yang ghālib). Kaidah ini jumlahnya ada 40 buah, dan secara terperinci bisa dilihat dalam pembahasan di bawah ini.

### B. Pembahasan Empat Puluh Kaidah-Kaidah Kullīyah (yang disepakati).

Kaidah pertama:

الاجتهاد لا ينقض بالإجتهاد

*Ijtihād* itu tidak bisa dihapus dengan *ijtihād* yang lain.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, hasil keputusan *ijtihād* yang telah lalu tidak bisa dihapuskan oleh keputusan *ijtihād* yang datang kemudian<sup>2</sup>. Jadi, apabila seorang mujtahid telah

<sup>1</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān Al-Suyūthī, *Al-Asybah wa al-Nadhāir*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia), 71.

<sup>2</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushudiyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 144. Lihat pula pada Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Aswāliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah, t.t.),

memutuskan suatu hukum pada masa lalu, kemudian keputusan itu berbeda dengan keputusan dia di kemudian hari, maka keputusan/ijtihad yang pertama itu tidak terhapus. Misalnya, apabila seseorang ber-ijtihad dalam menentukan arah shalat, antara ijtihad yang pertama ketika shalat dluhur berbeda dengan ijtihad yang kedua ketika shalat ashar, maka ijtihad yang pertama tetap sah atau shalat dluhurnya tetap sah. Contoh lain, seseorang yang akan melaksanakan shalat dhuhur tidak mendapatkan air setelah mencari kemana-mana, kemudian dia ber-ijtihad dengan melakukan tayammum, setelah shalat ia menemukan air maka ia tidak perlu mengulang shalatnya.

Keputusan seseorang itu bisa dibatalkan dan harus diubah menurut Imam al-Subki apabila :

- a. Keputusan yang menyimpang dari *nash* yang *sharih*
- b. Keputusan yang menyimpang dari pada *ijma'* atau menyalahi pendapat yang telah disepakati oleh empat imam madzhab: Hanafi, Malikî, Syafi'i, dan Hanbali.
- c. Keputusan yang menyimpang dari *nash* yang *jâli*.
- d. Keputusan yang menyimpang dari pada kaidah-kaidah *kulîyah*.
- e. Keputusan yang tanpa dalil.<sup>1</sup>

Sedangkan Muchlis Usman berpendapat bahwa hasil *ijtihâd* itu dapat dibatalkan apabila:

- a. *Ijtihad* yang kedua lebih kuat dari pada *ijtihad* pertama. Misalnya *qawl jadid* Imam al-Syafi'i dapat mengubah *qawl qadim*-nya.

- b. *Ijtihad* dahulu tidak relevan dengan kondisi atau keadaan yang dihadapi dewasa ini, sehingga hasil *ijtihad* tersebut perlu direvisi.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah:

### تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة والاحوال

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Kaidah kedua:

### إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Manakala halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram.<sup>1</sup>

Menurut kaidah ini, apabila ada dua dalil yang bertentangan mengenai suatu masalah; ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan, maka dimenangkan yang mengharamkan, karena lebih *ikhtiyath* (sikap hati-hati). Contoh dalam masalah ini adalah ketetapan Khalifah Usman tentang ketentuan mengawini dua perempuan bersaudara sekaligus. Menurut al-Qur'an surat al-Nisa ayat 22, tidak diperbolehkan mengawini dua saudara sekaligus. Ayat ini bertentangan dengan surat al-Nisa ayat 23 yaitu, diperbolehkan mengawini dua saudara (perempuan) apabila yang satu berstatus merdeka dan yang satu berstatus hamba.

Dalam memutuskan kasus tersebut, Khalifah Usman lebih memilih dalil yang pertama, yaitu melarang mengawini dua wanita bersaudara sekaligus.

Kaidah ini mempunyai beberapa cabang yaitu:

### إذا تعارض المانع والمقتض يقدم المانع

<sup>1</sup>

Dikutip oleh Abu Bakar bin Abu Qasim al-Ahdal, terjemahan al-Faraid al-Bahiyah Risalah al-Qawaid al-Fiqh, terj. M. Adib Bisri, (TK. : Menara Kudus, 1977), 31.

Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah, 145.  
Al-Suyuthi, Al-Asybah, 74.



Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukan yang mencegah.<sup>1</sup>

Menurut kaidah ini, apabila terjadi perlawanan dalam suatu perkara yang di situ terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan harus dicegah, tapi di situ juga terdapat sesuatu yang mengandung ketentuan untuk dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegahnya. Misalnya, menikah adalah sesuatu yang dianjurkan, tetapi apabila ada masalah di dalamnya di mana seseorang itu dihadapkan pada sepuluh orang perempuan, dan diminta untuk memilih satu perempuan untuk dinikahi, tetapi salah satu dari mereka adalah saudaranya. Dan ia tidak tahu yang mana muhrimnya, maka menurut kaidah ini, tidak boleh menikahi salah seorang dari kesepuluh wanita itu, sampai jelas/tahu siapa muhrimnya.

إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر

Apabila dalam ibadah itu berkumpul segi hadlar (tidak bepergian) dan segi safar (bepergian), maka yang dimenangkan segi hadlarnya.<sup>2</sup>

Menurut kaidah ini, apabila aspek bepergian dan di rumah berkumpul, maka yang dimenangkan adalah aspek di rumahnya. Misalnya, seseorang telah berniat puasa pada malam hari, kemudian siangya dia bepergian, maka diharamkan baginya berbuka puasa. Contoh lain, seseorang yang sedang bepergian dan mendapatkan rukhsah untuk shalat, tetapi di tengah perjalanan dia belum bisa melaksanakan shalat jama' qashar-nya hingga ia sampai di rumah, maka setelah sampai di rumah ia tidak diperbolehkan meng-qashar-nya.

<sup>1</sup> Ibid, 80

<sup>2</sup> Ibid, 79

Kaidah ketiga:

الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب

Mempersilahkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri dalam hal ta'at itu makruh, dan di dalam hal lain adalah disukai.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan kaidah di atas, para ulama berbeda pendapat:

Pertama, pendapat sebagian ulama persis dengan bunyi kaidah di atas, yakni makruh mengalah dalam masalah ibadah. Namun sebaliknya, sunnah mengalah dalam hal selain ibadah. Contohnya, Ahmad akan berjama'ah dan telah mendapatkan shaf awal, tetapi kemudian mempersilahkan Badrun menempati tempatnya di shaf awal, maka itu hukumnya makruh.

Kedua, ada yang berpendapat *itsar* dalam perkara ta'at itu hukumnya bukan makruh tetapi haram.

Ketiga, al-Suyûthî memberikan perincian, apabila *itsar* itu berakibat meninggalkan perkara wajib, maka hukumnya haram. Dan apabila *itsar* itu berakibat meninggalkan sunnah atau melakukan makruh, maka *itsar* itu makruh<sup>2</sup>.

Kaidah keempat:

التابع تابع

Pengikut hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti.<sup>3</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah; sesuatu yang secara esensial (materinya) mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya pun mengikut kepada yang diikuti itu. Sebab pengikut itu merupakan bagian dari sesuatu (seseorang) yang diikuti, atau

<sup>1</sup> Ibid, 80. Dan di dalam al-Syaykh 'Abd Allah ibn Sa'id Muhammad 'Ubâdî, *Idlâh al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*, (Surabaya: Maktabah Hidayah, t.t), 58., tertulis kaidah yang sepaham dengan kaidah tersebut dengan الإيثار في القرب مكروه saja.

<sup>2</sup> Imam Musbikin, *Qawâ'id al-Fiqhîyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 117.

<sup>3</sup> Al-Suyûthî, *Al-Asybah*, 81., lihat pula pada Ubadi, *Idlâh al-Qawâ'id*, 59-60.

bagian tersebut mempunyai hubungan dalam proses terjadinya, seperti anggota tubuh dari hewan, anak yang ada dalam perut induknya, bulu-bulunya dan sebagainya. Contohnya, orang yang menjual kambing maka semua, seperti anak yang ada dalam perut induknya, bulunya, tanduknya semua juga ikut terjual bersama-sama kambing tersebut.

### Cabang-cabang kaidah

#### التابع لا يفرد بالحكم

*Pengikut tidak dikenai hukum tersendiri.<sup>1</sup>*

Menurut kaidah induk di atas, pengikut merupakan bagian dari sesuatu yang diikuti, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Untuk itu kaidah ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum yang mengikuti tidak bisa terlepas dengan hukum yang diikuti. Misalnya, seseorang menjual anak binatang yang masih dalam kandungan, maka hukumnya tidak boleh apabila induknya tidak ikut dijual.

#### التابع يسقط بسقوط المتبوع

*Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti.<sup>2</sup>*

Menurut kaidah ini, apabila hukum yang diikuti itu gugur, maka hukum yang mengikuti juga ikut gugur. Contohnya, seseorang yang menjadi gila tidak diwajibkan lagi shalat fardlu, begitu juga shalat sunnat rawatibnya, juga menjadi gugur/ tidak disunnatkan lagi baginya.

#### التابع لا يتقدم على المتبوع

*Pengikut itu tidak mendahului yang diikuti.<sup>3</sup>*

Menurut kaidah ini, sesuatu yang diikuti harus lebih dahulu dari pada yang mengikuti. Misalnya, tidak diperbolehkan seorang makmum mendahului imamnya.

#### يغفر في التابع ما لا يغفر في غيرها

*Dapat dima'afkan pada hal-hal yang mengikuti, apa tidak demikian halnya pada yang lainnya.<sup>1</sup>*

Menurut kaidah ini, suatu perkara di mana ada suatu hal yang dianggap pangkal (pokok) dan ada yang dianggap pengikutnya saja, maka pada yang pokok harus dipenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana ketentuan syara'. Berbeda dengan sesuatu yang mengikuti, maka dimaafkan apabila ada kekurangan. Misalnya, dalam akad wakaf disyaratkan agar benda yang akan diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak, kecuali apa yang telah dikenal/lazim contohnya wakaf buku dan alat-alat kematian. Jadi apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka akad itu tidak sah. Hal ini berbeda apabila yang tidak terpenuhi adalah pengikut benda yang tidak bergerak itu, maka itu diperbolehkan, dan tidak mempengaruhi sahnya wakaf.

Kaidah kelima:

#### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Kebijakan Imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.<sup>2</sup>*

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyatnya harus memperhatikan kemaslahatan rakyatnya itu secara keseluruhan, bukan kemaslahatan perorangan atau kelompok saja. Kaidah ini mencakup banyak permasalahan kenegaraan (fiqh siyasah), misalnya, peraturan-peraturan umum dalam pemerintahan,

1 Al-Suyûthî, al-Asybah, 81

2 Ibid.

3 Ibid., 82., lihat pula pada Ubadi, *Idlah al-Qawaid al-Fiqhiyah*, 61.

1 Al-Suyûthî, al-Asybah., 83.

2 Ibid.

serta kebijakan pemerintah kepada rakyatnya. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat, sebagaimana hadits Nabi SAW:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (رواه الشيخان عن ابن عمر)

Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar)

Kaidah keenam:

### الحدود تسقط بالشبهات

Hukuman-hukuman (*had*) itu bisa gugur karena syubhat (ketidakjelasan).<sup>1</sup>

Menurut kaidah ini, seseorang itu bisa dikenakan hukuman *had*, apabila ia telah jelas melakukan suatu pelanggaran, sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi apabila perbuatan itu masih syubhat (tidak jelas), maka hukuman *had* itu bisa gugur. Misalnya bila seseorang mencuri suatu barang yang menjadi milik bersama (dengan temannya). Maka ia tidak bisa dikenai hukuman *had* (potong tangan), karena status benda/ barang yang dicuri itu juga miliknya. Contoh lain misalnya dalam hal perzinahan dan pembunuhan, apabila tidak ditemukan bukti yang akurat atau buktinya masih belum jelas, maka hukuman *had* tidak bisa dijatuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

ادروا الحدود بالشبهات (أخرجها أبي عدى من حديث ابن عباس)

Tinggalkan *had-had*, karena syubhat (samar-samar). (HR. Ibn 'Ady dari hadits Ibnu 'Abbas)

<sup>1</sup> Ibid., 84.

Dalam hadits yang lain juga dijelaskan:

ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فان الامام لأن يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة (رواه الترمذى والحاكم عن عائشة)

Hindarilah hukuman *had* bagi orang muslim sedapat-dapatnya, karena apabila kamu memperoleh jalan keluar bagi orang muslim (untuk tidak diberi *had*) maka berikan jalannya, sebab sesungguhnya penguasa (imam) itu sekiranya salah dalam rangka memberikan maaf, adalah lebih baik daripada salah dalam rangka memberikan hukuman. (HR. Turmudzi dan Hakim dari Aisyah).

Kaidah ketujuh:

### الحر لا يدخل تحت اليد

Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan (kekuasaan).<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, orang yang merdeka kedudukannya tidak dikuasai oleh pihak manapun, sebab ia tidak ada yang memiliki. Lain halnya dengan hamba sahaya, maka statusnya di bawah kepemilikan tuannya. Misalnya, seorang laki-laki berzina dengan seorang hamba sahaya atas dasar suka sama suka, maka laki-laki itu bisa dituntut untuk membayar mas kawin. Sebab budak perempuan itu mempunyai penguasa/majikan yang memilikinya. Lain halnya apabila laki-laki itu berzina dengan wanita merdeka, maka ia tidak bisa dituntut untuk membayar mas kawin, karena wanita merdeka itu tidak di bawah kekuasaan siapa pun.

Kaidah ini oleh Imam Tajuddin al-Subkî ditolak, karena menurutnya wanita merdeka itu masuk dalam kekuasaan walinya. Dan lagi, kaidah ini tanpa dilandasi dalil apapun, baik dari nash ataupun ijma' sahabat. Padahal setiap kaidah *fiqhîyah* itu

<sup>1</sup> Ibid., 85., lihat pula keterangan pada Ubadi, *Ilāh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, 64.



harus dilandasi dengan dalil.

#### Kaidah kedelapan:

الحريم له حكم ما هو حريم له

Yang melingkupi sesuatu hukumnya sama dengan apa yang dilingkupi.<sup>1</sup>

Arti "harîm" ada yang menterjemahkan dengan "pagar" atau "emper". Menurut Imam Zarkasyî "harîm" adalah "yang meliputi haram". Jadi *harîm* ini bisa diterjemahkan dengan "yang mengitari", "yang melingkupi", dan "yang ada di sekitarnya". Contoh dari kaidah ini adalah, dalam hal wudlu ayat al-Qur'an memerintahkan membasuh muka. Ulama fiqh mewajibkan pula membasuh bagian sekitar muka karena merupakan *harîm* daripada muka.

#### Kaidah kesembilan:

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً

Manakala dua perkara dari satu jenis berkumpul/menyatu, padahal tidak ada perbedaan maksud keduanya, maka pada ghalibnya, satu di antaranya masuk pada yang lain.<sup>2</sup>

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, apabila ada dua perkara yang maksud dari keduanya sama, dan berkumpul dalam satu masalah, maka satu dari dua perkara tersebut dimasukkan kepada yang lain. Maksudnya, cukup mengerjakan salah satu dari dua perkara yang lebih besar, karena sudah mencakup perkara yang lain. Karena pada dasarnya yang besar sudah mencakup perkara yang kecil. Misalnya, apabila *hadats* besar (*haidl/junub*) dan *hadats* kecil berkumpul, maka yang di-

hitung *hadats* besarnya saja. Artinya cukup dengan mandi saja, menurut pendapat salah satu madzhab.<sup>1</sup>

Contoh lain, seseorang mengakui melakukan zina dua kali, maka menurut hukum ia hanya dijatuhi hukuman berbuat zina sekali saja, yakni didera seratus kali dan dibuang setahun.<sup>2</sup>

#### Kaidah kesepuluh:

إعمال الكلام أولى من إهماله

Mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya.<sup>3</sup>

Sebuah ucapan itu adakalanya jelas maksudnya, dan adakalanya tidak jelas maksud sebenarnya. Untuk perkataan yang jelas maksudnya, maka haruslah diamalkan sesuai dengan maksudnya. Dan untuk perkataan yang tidak jelas maksudnya, maka mengamalkannya lebih baik daripada meniadakannya. Contohnya, seseorang yang akan meninggal berwasiat: "apabila nanti saya mati, sawah dan rumah saya ini saya berikan kepada anak saya". Padahal orang tersebut hanya mempunyai seorang cucu, sedangkan anak (bapaknya dari cucu) telah meninggal. Maka wasiat itu harus diindahkan dengan cara sawah dan rumah itu menjadi milik cucunya.

#### Kaidah kesebelas:

الخارج بالضمنان

Berhak mendapatkan sesuatu (hasil) disebabkan karena keharusan mengganti kerugian atau Hasil (manfaat itu diimbangi) dengan tanggungan.<sup>4</sup>

Kaidah di atas diambil dari hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Dâwud, Imam Turmidzî, Nasa'i, Ibn Majah dan Ibn Hibban, yaitu :

1 Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 24.

2 Ibid.

3 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 89.

4 Ibid., 93., kaidah serta penjelasan serupa terdapat juga dalam Ubadi, *Idlâh al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, 68.

1 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 86.

2 Ibid.



ان رجلا ابتاع عبدا فاقام عنده ماشاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله فقد استعمل غلامى الخرج بالضمان (اخرجه الشافعى عن عائشة)

Bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli itu mendapatkan cacat pada budak tersebut, dan melaporkan kepada Nabi SAW., maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu: "wahai Rasul, ia (pembeli) telah mengerjakan (mengambil manfaat) dari budakku". Rasul bersabda: "hak mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian".

Pengertian "al-kharaj" dalam hadits di atas menurut Abu Ubayd adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang yang kemudian menyuruh kepada hamba supaya bekerja untuk waktu tertentu. Tetapi setelah diketahui cacat yang disembunyikan oleh penjual, maka ia dikembalikan kepada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapatkan keuntungan mempekerjakan hamba itu, karena ia telah memberikan pembelanjannya, dan apabila ada kerugian ia yang rugi.

Contoh dari kaidah di atas adalah, A membeli mobil kepada B seharga Rp. 15.000.000,- dengan syarat tidak ada cacatnya dan bila ada yang cacat boleh dikembalikan dan akan menerima uangnya kembali. Tetapi setelah beberapa hari baru diketahui bahwa mobil itu cacat, maka mobil itu dikembalikan kepada penjual dan penjual itu dituntut mengembalikan uang Rp.15.000.000,-. Dan apabila penjual itu menuntut ganti rugi atas mobil yang telah dipakai, maka itu tidak diperbolehkan.

### Kaidah kedua belas:

الخروج من الخلاف مستحب

Keluar dari pertentangan itu diutamakan.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, kita dianjurkan agar menjauhi prasangka-prasangka dan memelihara diri dari perkara yang syubhat yang dipertentangkan/diperselisihkan oleh para ulama' dengan mencari jalan keluar. Berusaha mencari jalan keluar dari perselisihan adalah jalan yang sangat disukai. Dalil dari kaidah ini adalah Surat al-Hujurat ayat 12 :

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم (الحجرات: ١٢)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berbuat berprasangka buruk (sebab) sebagian dari berprasangka buruk itu adalah dosa.

Untuk menghindari *khilâfîyah* yang tajam harus sesuai dengan syarat-syarat antara lain:

- Tidak membuat *khilâfîyah* yang baru lagi, atau apabila seseorang itu keluar dari khilaf itu tidak masuk dalam khilaf lainnya.
- Tidak berlawanan dengan sunnah.
- Mukhalif-nya harus mempunyai dalil yang kuat. Jika dalilnya lemah, maka dianggap gugur dan tidak dapat dimasukkan dalam masalah *khilâfîyah*.<sup>2</sup>

### Kaidah ketigabelas:

الدفع أقوى من الرفع

Menolak gugatan itu lebih kuat daripada menggugat (menghilangkan).<sup>3</sup>

1 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 94., lihat pula pada Hakim, *Mabâdî Auwâliyah*, 41-42., dan Ubadi, *Idlâh al-Qawâ'id*, 68-69.

2 Mushikîn, *Qawâ'id al-Fiqhîyah*, 140.

3 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 95., Ubadi, *Idlâh al-Qawâ'id*, 70.

Menurut kaidah ini, menolak agar tidak terjadi sesuatu (preventif) itu lebih kuat daripada mengembalikan seperti sebelum terjadi (kuratif rehabilitatif). Contohnya, seorang lelaki muslim berniat akan menikah dengan perempuan Kristen. Perbedaan agama ini, seketika itu bisa membatalkan/menolak sahnya pernikahan. Tetapi jika ada lelaki dan perempuan sama-sama Islam dan telah terikat sebagai suami isteri, kemudian pada suatu saat si isteri pindah agama, maka pernikahan antara keduanya tidak bisa seketika menjadi batal, melainkan masih harus menunggu sampai habis masa iddah.

#### Kaidah keempatbelas:

#### الرخص لا تتأط بالمعاصي

Kemurahan itu tidak dapat dihubungkan dengan maksiat.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, apabila seseorang berada dalam kondisi kepayahan/kesulitan diperbolehkan mengambil *rukhsah*. Tetapi apabila *rukhsah* itu diambil karena telah melakukan perkara yang maksiat, maka itu tidak diperbolehkan. Contohnya, shalat *qashar*, *jama'* dan berbuka puasa, kesemuanya itu keringanan bagi orang yang bepergian jauh. Tetapi jika bepergiannya itu sejak semula untuk perbuatan maksiat, maka *rukhsah* itu tidak berlaku padanya.

#### Kaidah kelimabelas:

#### الرخص لا تتأط بالشك

Kemurahan/keringanan-keringanan itu tidak bisa dihubungkan/digantungkan dengan keraguan.<sup>2</sup>

Menurut kaidah ini, *rukhsah* itu diberikan apabila perkara yang menyebabkan seseorang mengambil *rukhsah* itu sudah jelas. Artinya, apabila *rukhsah* itu terkait dengan menjama'

1 Al-Suyūthī, *al-Asybah*.

2 Ibid., 96., Ubadi, *Īdāh al-Qawā'id*, 72.; dan Hakim, *Mabādi' Awwaliyah*, 43.

shalat, maka jaraknya seseorang bepergian itu harus mencapai jarak yang memperbolehkan ia menjama' shalat.

Contohnya, Ali mau mengunjungi temannya, tetapi ia tidak tahu jarak rumah temannya itu dengan rumahnya mencapai batas jarak yang memperbolehkan *rukhsah qashar* shalat atau tidak. Karena adanya keraguan, maka ia tidak diperbolehkan melaksanakan shalat *jama'*.

#### Kaidah keenambelas:

#### الرضا بالشئ رضى بما يتولد منه

Ridla/rela terhadap sesuatu berarti ridla/rela terhadap apa yang timbul daripadanya.<sup>1</sup>

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, apabila seseorang menyetujui/merelakan suatu perkara/akad, maka ia harus rela menanggung resikonya. Misalnya, seseorang membeli sepeda motor dengan harga Rp. 9.000.000,-. Ketika transaksi jual beli sepeda ini dilakukan, pembeli sudah tahu kondisi/kerusakan yang ada pada sepeda tersebut dan ia tetap membelinya. Tetapi setelah satu minggu sepeda tersebut rusak dan harus diperbaiki, maka menurut kaidah ini ia harus menanggung sendiri resiko kerusakan itu dan tidak boleh meminta ganti rugi kepada penjual sepeda tadi.

Kaidah ini mengecualikan masalah-masalah seperti, seorang suami yang memukul istrinya, guru memukul muridnya, *ta'zir* yang dilakukan hakim. Meskipun semua itu diperbolehkan/diizinkan, tetapi apabila pemukulan itu sampai mengakibatkan mati, maka suami/guru/hakim tersebut wajib membayar *diyat*.

#### Kaidah ketujuhbelas:

#### السؤال معاد فى الجواب

1 Al-Suyūthī *al-Asybah*, 97., Hakim, *Mabādi' Awwaliyah*, 47., Ubadi, *Īdāh al-Qawā'id*, 72.

Pertanyaan itu diulang dalam jawaban.<sup>1</sup>

Menurut kaidah ini, hukum dari suatu jawaban itu terletak pada soalnya. Contohnya, seorang hakim bertanya kepada seseorang yang dianggap telah membunuh Ali: "apakah kamu telah membunuh Ali?", Lalu ia mendapat jawaban: "ya". Jawaban ya, ini sama dengan: "ya, saya telah membunuh Ali", sebab pertanyaan itu diulang dalam jawaban. Karena itu ia akan dikenai hukum *qishah* karena ia telah mengakui (*iqrar*) perbuatannya.

**Kaidah kedelapanbelas:**

لا ينسب الى ساكت قول

Yang diam tidak dianggap bicara.<sup>2</sup>

Selain kaidah di atas, ada kaidah lain belakangnya ditam-  
bahi rumusan sehingga menjadi:

لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة  
الى البيان بيان

Suatu perkara itu tidak dapat disandarkan kepada orang yang diam, akan tetapi jika diam pada tempat yang membutuhkan keterangan adalah merupakan keterangan.<sup>3</sup>

Dari kedua kaidah di atas dapat diambil pengertian, kepu-  
tusan hukum tidak dapat diambil dari orang yang diam, kecuali  
ada *qarinah-qarinah* yang dapat diambil darinya. Namun diam-  
nya seseorang yang sedang dibutuhkan keterangannya, dapat  
dijadikan dalil adanya suatu keterangan. Misalnya, seseorang  
dituduh telah melakukan pembunuhan. Kemudian di depan  
pengadilan dia tidak menjawab/diam ketika hakim menan-

yakan tuduhan itu. Oleh karena itu, diamnya tertuduh tidak  
bisa dijadikan jawaban bahwa ia telah membunuh. Dan peng-  
gugat dalam hal ini harus mendatangkan bukti-bukti yang kuat  
yang membuktikan bahwa tertuduh/tergugat telah membunuh.  
Contoh lainnya, seorang janda dimintai persetujuan untuk  
dinikahkan dengan seorang pria, kemudian janda itu diam saja,  
maka diamnya seorang janda itu tidak dianggap bicara, atau  
mengucapkan ya. Masalah-masalah berikut dikecualikan dari  
kaidah di atas, yaitu:

- Diamnya gadis ketika dimintai persetujuannya untuk menikah.
- Terdakwa yang seharusnya bersumpah, ketika diminta un-  
tuk bersumpah oleh hakim ternyata diam saja. Menurut  
hukum ia dianggap tidak berani/ tidak mau bersumpah.
- Sebagian orang kafir yang mengikat perjanjian dengan  
orang muslim telah melanggar janji, tetapi sebagian yang  
lain diam saja. Maka semua orang kafir dianggap telah me-  
langgar hukum.
- Pemilik/majikan dari hamba sahaya yang merusak hak  
milik orang lain, wajib mengganti hak milik orang lain  
yang dirusakkan itu, kalau ia tahu dan diam saja, dan lain-  
lain.<sup>1</sup>

**Kaidah kesembilanbelas:**

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

Apa yang lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pula pahalanya.<sup>2</sup>

Kaidah ini diambil dari hadits Nabi SAW., *أجر ك على قدر نصبك*,  
artinya; *Pahalamu itu (didasarkan) atas kadar kecapaian/kelela-  
hanmu*. Misalnya, shalat *dhuha* delapan raka'at pahalanya lebih

1 Al-Suyûthi, al-Asybah.

2 Ibid., 97.

3 Rahman, Qaidah-Qaidah, 107.

1 Mushikini, Qawa'id, 146., lihat pula pada Ubadi, *Idlah*, 74-75.

2 Al-Suyûthi, Al-Asybah, 98., Ubadi, *Idlah*, 75.



banyak daripada yang empat raka'at.

Masalah-masalah berikut dikecualikan dari kaidah di atas:

- Shalat *qashar* ketika bepergian lebih utama daripada shalat biasa.
- Shalat *dhuha* lebih baik 8 rakaat, walaupun menurut Nabi batas maksimal 12 rakaat.
- Membaca surat pendek dalam shalat berjama'ah lebih baik daripada potongan surat meskipun panjang.
- Shalat jamaah sekali lebih utama daripada shalat sendirian 25 atau 28 kali. Dan lain-lain.<sup>1</sup>

#### Kaidah kedua puluh:

#### المتعدى أفضل من القاصر

*Amal yang muta'addi (merembet) itu lebih utama dari pada amal qashir (tidak merembet).*<sup>2</sup>

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian, setiap perbuatan yang manfaatnya lebih luas cakupannya, baik untuk kepentingan pribadi dan orang banyak, walaupun orang lain tidak ikut melakukannya, maka itu lebih baik/utama dari pada perbuatan yang hanya untuk kepentingan/berguna bagi orang yang melakukannya saja.

Lebih jelas Imam Syafi'<sup>3</sup> menyatakan bahwa, menuntut ilmu syar'i seperti ilmu fiqh, tafsir, dan sebagainya adalah lebih utama daripada shalat sunnat, sebab pahala shalat sunnat itu hanya terhenti pada orang yang shalat itu saja. Sedangkan pahala menuntut ilmu tidak hanya terhenti pada amalan ilmu itu sendiri, melainkan amalan itu manfaatnya bisa meluas untuk orang banyak.

#### Kaidah kedua puluh satu:

#### الفرض أفضل من النفل

*Fardlu itu lebih utama dari pada sunnah.*<sup>1</sup>

Menurut kaidah ini, melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan/diwajibkan itu kedudukannya lebih utama daripada melaksanakan suatu ketetapan yang disunnahkan. Misalnya seseorang yang masih mempunyai tanggungan puasa Ramadhan, kemudian ia melakukan puasa sunnah tanpa meng-qadla puasa Ramadhan terlebih dahulu. Maka seharusnya, ia mengadha puasa Ramadhan terlebih dahulu, baru kemudian puasa sunnah. Adapun masalah-masalah yang dikecualikan dari kaidah ini adalah :

- Masalah *ibra' al-mu'sir*, yaitu membebaskan hutang orang yang tidak mampu melunasinya. Sehingga meskipun *ibra'* (membebaskan) itu sunnah, namun kedudukannya lebih utama dari pada *indhār* (memberi tempo) yang hukumnya wajib.
- Memulai dahulu memberikan salam kepada setiap orang yang bertemu itu adalah sunnah hukumnya, sedangkan jawaban dari orang yang mendengarkan adalah wajib. Meskipun memberikan salam itu hukumnya sunnah, tetapi memberikan salam itu lebih utama kedudukannya daripada menjawab salam.
- Adzan hukumnya sunnah, sedangkan menjadi imam dalam shalat Jum'at adalah wajib. Akan tetapi, adzan itu lebih utama daripada menjadi imam shalat Jum'at.
- Wudlu sebelum datangnya shalat itu sunnah hukumnya, sedangkan wudlu sesudah masuk waktu shalat dan akan melaksanakan shalat adalah wajib. Meskipun demikian, wudlu sebelum datang waktu shalat lebih utama daripada wudlu sesudah datangnya waktu shalat.

1 Al-Suyūthī, al-Asybah.

2 Ibid., 99.

3 Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah, 163.

1 Al-Suyūthī, Al-Asybah, 98



- e. Dalam suatu pertengkaran, orang yang wajib mengalah adalah yang bersalah, sedangkan yang benar, mengalah itu adalah sunnah masing-masing demi redanya pertengkaran tersebut. Namun mengalahnya orang yang benar, lebih baik daripada mengalahnya orang yang bersalah.<sup>1</sup>

#### Kaidah kedua puluh dua:

##### الفضيلة المتعلقة بنفس العبادت أولى من المتعلقة بمكانها

*Fadlilah/keutamaan yang berhubungan dengan ibadah itu sendiri, lebih utama daripada fadlilah yang dihubungkan dengan tempatnya.<sup>2</sup>*

Misalnya, shalat fardlu di dalam masjid lebih utama daripada di luar masjid. Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat di masjid sendirian dan shalat sunnah di rumah lebih utama daripada shalat sunnah di masjid, sebab dengan shalat sunnah di rumah akan menambah kekhusyuan.

#### Kaidah kedua puluh tiga:

##### الواجب لا يترك الا لواجب

*Wajib itu tidak dapat ditinggalkan kecuali karena wajib.<sup>3</sup>*

Maksud dari kaidah ini adalah, sesuatu yang telah diwajibkan untuk dikerjakan, hanya dapat ditinggalkan manakala ada sesuatu yang mewajibkan untuk meninggalkan. Misalnya, membedah perut itu diharamkan, jadi perut wajib dijaga jangan sampai terbedah. Tetapi manakala seseorang itu sakit dan jalan satu-satunya untuk mengobatinya harus dibedah, maka harus dibedah. Demikian juga harus dibedah apabila seorang ibu yang akan melahirkan dan tidak bisa melahirkan kecuali dengan

1 Mushbin, *Qawā'id*, 153-154., mengenai penjelasan tersebut bisa dilihat pula pada Ubadi, *Idlāh*, 77-78.

2 Al-Suyūthī, *Al-Asybah*, 100., Ubadi, *Idlāh*, 78.

3 *Ibid.*, 101., keterangan lebih lanjut lihat pada Abu Bakr, *Farā'id al-Bahiyah*, 179-141.

pembedahan atau seseorang yang harus dioperasi sebagai jalan satu-satunya pengobatan. Maka kewajiban menjaga perut agar tidak terbedah, dapat ditinggalkan, demi menyelamatkan jiwa seseorang itu dari kematian.

#### Kaidah kedua puluh empat:

##### ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه

*Sesuatu yang dengan kekhususannya, telah menetapkan yang lebih besar di antara dua perkara, tidak dapat menetapkan yang lebih ringan dengan keumumannya.<sup>1</sup>*

Maksud dari kaidah ini adalah dua perkara yang saling bertentangan dalam melahirkan suatu hukum. Yang satu merupakan perkara-perkara yang umum dan akan melahirkan hukum yang lebih ringan, dan yang satunya adalah perkara yang bersifat khusus dan akan melahirkan perkara yang lebih berat. Maka bila telah dikenakan/diwajibkan hukum yang lebih berat karena perkara yang khusus, maka hukum yang lebih ringan karena perkara yang lebih umum tidak lagi diwajibkan. Misalnya, memasuki rumah orang lain tanpa izin itu dilarang dan dapat dituntut, walaupun hukumnya ringan. Tetapi orang yang memasuki rumah orang lain itu tanpa izin kemudian mencuri. Maka yang dituntut hukuman hanyalah mencurinya saja, sedangkan masuknya rumah orang lain tanpa izin tidak dituntut hukuman.

#### Kaidah kedua puluh lima:

##### ما ثبت بالشرع مقدم على ماوجب بالشرط

*Sesuatu yang ditetapkan dengan syara' itu, didahulukan atas sesuatu yang*

1 Al-Suyūthī, *al-Asybah*, 101.

ditetapkan dengan syarat.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan dengan *syara'* harus didahulukan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan syarat-syarat (kondisi-kondisi) yang dibuat oleh manusia. Atau dengan kata lain, semua ketetapan yang ada dalam *syara'* itu harus diutamakan daripada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Contohnya, *nadzar* melakukan shalat wajib tidak diperbolehkan, sebab shalat wajib adalah telah ditetapkan oleh nash/ dalil *syara'*, sedangkan *nadzar* hanyalah merupakan janji yang dibuat oleh manusia. Contoh lain, seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai dengan imbalan (*khulu'*) uang satu juta rupiah, dengan syarat *ruju'* kembali." Maka *thalaq* suami jatuh sebagai *thalaq raj'i*, dan *khulu'*nya tidak jadi, sebab *ruju'* itu ditetapkan oleh peraturan *syara'*, sedangkan *khulu'* ditetapkan dengan perjanjian.

**Kaidah kedua puluh enam:**

ما حرم استعماله حرم اتخاذه

Sesuatu yang haram digunakan berarti haram pula memperolehnya.<sup>2</sup>

Dari kaidah ini dapat diambil pengertian bahwa, segala sesuatu yang diharamkan hukumnya apabila dipakai, maka diharamkan juga mencarinya. Misalnya meminum khamar diharamkan, maka membelinya atau makan harta hasil penjualannya juga haram.

**Kaidah kedua puluh tujuh:**

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

Apa yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya.<sup>3</sup>

1 Ibid., 102.

2 Ibid., Ubadi, *Idlāh*, 81-82.

3 Ibid., 102.

Menurut kaidah ini, mengambil sesuatu yang diharamkan, lalu hasilnya kita berikan kepada orang lain, dapat diibaratkan bersekutu dengannya. Misalnya memberikan uang kepada orang lain dari hasil curian, suap, dll.

**Kaidah kedua puluh delapan:**

المشغول لا يشغل

Sesuatu yang sudah dijadikan obyek tertentu, maka tidak boleh dijadikan obyek yang lain.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, sesuatu yang sedang dijadikan obyek dari suatu aqad, tidak boleh dijadikan obyek dari suatu aqad yang lain, karena ia telah terikat dengan akad yang pertama. Misalnya, menjual barang yang sudah dibeli orang, kemudian dijual kepada orang yang lainnya lagi atau meminang perempuan yang sudah menjadi pinangan laki-laki lain. Maka semua itu tidak diperbolehkan.

**Kaidah kedua puluh sembilan:**

المكبر لا يكبر

Yang sudah dibesarkan, tidak dibesarkan (lagi).<sup>2</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, suatu perkara yang sudah dibesarkan atau ditingkatkan hukumnya sampai kepada hukum yang tertinggi, maka tidak dapat lagi ditingkatkan/ ditambah/ diperbesar dengan hukum yang di bawahnya. Misalnya, mencuci kotoran itu disunnahkan sampai tiga kali, tetapi kalau kotoran itu najis dari jilatan anjing, maka tidak disunnahkan lagi sampai tiga kali. Sebab sudah diperbesar dengan diharuskan mencuci tujuh kali, dan air pertamanya harus dicampur dengan debu.

1 Ibid., Ubadi, *Idlāh*, 83.

2 Al-Suyūthī, *al-Asybah*, 103., Ubadi, *ibid*, 84.

## Kaidah ketigapuluh:

من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

Barangsiapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka dia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu.<sup>1</sup>

Misalnya, arak dalam botol apabila didiamkan beberapa hari akan berubah menjadi cuka, dan itu suci hukumnya. Tetapi apabila seseorang itu tergesa-gesa ingin mendapatkan cuka, kemudian arak itu dimasuki sesuatu agar berubah menjadi cuka maka tidak diperbolehkan. Menurut Imam Suyuthi, yang masuk dalam kaidah ini hanyalah mengenai perbuatan seseorang yang ingin cepat kaya/mendapatkan harta warisan, kemudian membunuh saudaranya, maka tidak diperbolehkan.

## Kaidah ketigapuluh satu:

النفل أوسع من الفرض

Sunnah itu lebih luas daripada fardlu.<sup>2</sup>

Misalnya, menjalankan puasa sunnah itu boleh diniati pada pagi hari, sedangkan puasa fardlu harus diniati pada malam hari. Begitu pula, tidak diharuskan shalat sunnah dengan berdiri, namun pada shalat fardludiharuskan dengan berdiri. Namun terkadang ada sunnah yang lebih sempit daripada fardlu, misalnya sujud sahwi hanya berlaku dalam shalat fardlu tidak pada shalat sunnah. Begitu juga tayamum, hanya diperbolehkan dalam shalat fardlu, tidak dalam shalat sunnah.

<sup>1</sup> Ibid., 103., Ubadi, *Idlah*, 85.

<sup>2</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah*, 104., Ubadi, *Idlah*, 86.

## Kaidah ketigapuluh dua:

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

Wilayah (kekuasaan) khusus itu lebih kuat daripada wilayah umum.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, suatu benda yang mempunyai penguasa/ pemilik yang khusus maka itu yang lebih berwenang daripada penguasa yang umum. Oleh karena itu selama penguasa yang khusus itu masih ada/ berfungsi, maka penguasa yang umum tidak boleh bertindak atas perkara/ sesuatu itu. Misalnya, selama masih ada bapak atau kakek (sebagai penguasa khusus), maka hakim (penguasa umum) tidak berhak menjadi wali, kecuali atas seizin mereka.

## Kaidah ketigapuluh tiga:

لا عبرة بالظن البين خطأه

Sangkaan yang jelas keliru, tidak dihiraukan.<sup>2</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, segala keputusan yang didasarkan pada dhan yang sudah jelas-jelas salahnya, maka tidak dapat dijadikan dasar sebagai pelaksanaan/ tidak boleh dikerjakan. Misalnya, seseorang yang menduga keras pada saat itu sudah masuk waktu dluhur, kemudian melaksanakan shalat dluhur, dan ternyata dugaannya itu keliru, maka shalatnya tidak sah.

## Kaidah ketigapuluh empat:

الإشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

<sup>1</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah*.

<sup>2</sup> Ibid., 106., Ubadi, *Idlah*, 88.

Berbuat yang tidak dimaksud berarti berpaling daripada maksud.<sup>1</sup>

Menurut kaidah ini, suatu perbuatan yang dikerjakan tanpa maksud tertentu, maka kepadanya tidak dapat dihukumkan kepada maksud tertentu. Misalnya, seseorang bersumpah: "Demi Allah saya tidak akan menetap dan diam di rumah ini". Mestinya ia harus segera keluar dari rumah itu, sebab yang menjadi maksud ucapannya adalah "ke luar" (rumah). Apabila ia tidak segera keluar dari rumah itu, berarti ia telah berpaling dari sumpah itu, dan menurut hukum, ia dianggap melanggar sumpah.

Kaidah ketigapuluh lima:

لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه

Masalah yang masih diperlisahkan, tidak diingkari, sedangkan yang diingkari adalah yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Menurut kaidah ini, segala masalah yang telah menjadi kesepakatan di dalamnya tentang sesuatu hukum haram misalnya, maka harus dijauhi benar-benar. Sedangkan pada masalah yang masih ikhtilaf kita tidak wajib inkar atasnya. Misalnya, terhadap orang yang minum arak (khamar) atau berzina, kita wajib inkar, tetapi terhadap orang yang minum bir atau orang yang menyemir rambut, kita tidak wajib inkar, sebab masalah ini masih diperselisihkan.

Kaidah ketigapuluh enam:

يدخل القوي على الضعيف ولا عكس

Yang kuat dapat masuk pada yang lemah, dan tidak sebaliknya.<sup>3</sup>

1 Al-Suyūthī, *al-Asybah*, 107., Ubadi, *Idlah*, 89.

2 Al-Suyūthī, *al-Asybah*, 107.

3 *Ibid.*, Ubadi, *Idlah*, 90.

Menurut kaidah ini setiap tuntutan, baik tuntutan untuk mengerjakan ataupun meninggalkan, maka tuntutan yang kuat itu sebenarnya telah mencakup atas tuntutan yang lebih lemah, sedangkan tuntutan yang lebih lemah tidak mencakup tuntutan yang lebih kuat. Misalnya, seorang laki-laki telah menggauli budak perempuannya, kemudian ia menikah dengan saudara budaknya itu. Maka menurut hukum, ia tidak boleh lagi menggauli budaknya itu, sebab hubungan dengan saudara perempuan budak itu lebih kuat, yaitu hubungan perkawinan.

Kaidah ketigapuluh tujuh:

يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

Sesuatu yang ketika menjadi tujuan tidak diampuni, diampuni waktu menjadi lantaran.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah, segala sesuatu yang pada waktu tertentu berkedudukan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, maka dapat dimaafkan/ dilonggarkan dengan menghilangkan atau mengurangnya. Namun ketika hal itu menjadi tujuan, baginya tidak ada kelonggaran dan harus dipenuhi. Misalnya, seorang dokter diperbolehkan membedah tubuh seorang pasien karena ia sebagai perantara penyembuhan pasien itu. Tetapi apabila melukai atau membedah itu sebagai tujuan, hal itu tidak diperbolehkan/ diharamkan.

Kaidah ketigapuluh delapan:

الميسور لا يسقط بالمعسور

Yang mudah tidak gugur karena yang sukar.<sup>2</sup>

Contohnya, orang yang baru bisa membaca al-Fatihah

1 Al-Suyūthī, *al-Asybah*, 107.

2 *Ibid.*, Ubadi, *ibid*, 91., penjelasan lebih lanjut terdapat pula pada Abu Bakr, *Faraid al-Bahiyah*, 166-169.



separuh, dalam shalat ia harus membaca yang separuh itu. Begitu pula, seseorang yang mempunyai satu lengan, dalam wudlu ia harus membasuh apa adanya, yaitu satu tangan yang dimilikinya itu.

**Kaidah ketigapuluh sembilan:**

مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارُ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ  
كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ

*Sesuatu yang tidak bisa dibagi itu, memilih sebagiannya sama dengan memilih seluruhnya dan menggugurkan sebagiannya sama dengan menggugurkan seluruhnya.<sup>1</sup>*

Maksud dari kaidah ini adalah segala sesuatu yang tidak bisa di bagi-bagi, maka dalam pelaksanaannya harus menyeluruh, tidak bisa hanya sepotong-sepotong saja. Oleh karena itu bila melaksanakan sebagian berarti melaksanakan keseluruhannya, begitu juga sebaliknya. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya: "Engkau aku cerai separoh saja". Karena *thalaq* itu tidak bisa dibagi, maka menurut hukum, *thalaq*nya jatuh satu. Memilih sebagiannya sama dengan memilih seluruhnya.

**Kaidah keempat puluh:**

إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوِ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قَدِمَتْ الْمُبَاشَرَةُ

*Manakala berkumpul sebab atau tipuan dengan pelaksanaan, maka pelaksanaan didahulukan.<sup>2</sup>*

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara berkum-

pul tiga faktor, yaitu: (a) sebab terjadinya kasus, (b) berwujudnya penipuan yang membantu terjadinya kasus, (c) perbuatan langsung yang mengakibatkan kasus, maka pertama kali yang dimintai pertanggung jawaban adalah perbuatan yang langsung menimbulkan kasus. Misalnya, dalam kasus pembunuhan yang melibatkan tiga orang, di mana orang yang pertama bertugas mencari atau menunjukkan tempat menyembapkan nyawa korban, orang yang kedua bertugas menipu dan mengajak makan korban, dan orang yang ketiga bertugas membunuh korban ketika korban itu diajak makan. Dalam peristiwa ini, yang harus dituntut terlebih dahulu adalah orang yang menyembapkan nyawa korban secara langsung, dari pada orang pertama dan kedua.

<sup>1</sup> Al-Suyūthī, *al-Asybah*, 108., Ubadi, *Īdlāh*, 92-93, dan pada Abu Bakr, *Farāid*, 169-171.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 109., dan pada Ubadi, *Īdlāh*, 93-94.

## BAB V

# KAIDAH-KAIDAH YANG MUKHTALAF

### A. Kaidah Pertama:

الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حالها

Shalat jum'at itu merupakan shalat dluhur yang diringkas, ataukah shalat sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

**A**da dua pendapat terkait dengan kaidah ini. Pertama, berpendapat bahwa shalat jum'at merupakan shalat dluhur yang diringkas. Akibatnya mereka juga membolehkan shalat jum'at yang di *jama'* dengan shalat ashar. Kedua, berpendapat bahwa shalat jum'at tidak boleh di *jama'* dengan shalat ashar, karena menurut kelompok kedua ini, shalat jum'at merupakan shalat tersendiri bukan shalat dluhur yang diringkas.<sup>2</sup>

### B. Kaidah Kedua:

1 Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān Al-Suyūthī, *Al-Asybah wa al-Nadhāir*, (Indonesia: Dar al-Ihya, t.th.), 109.

2 Mengenai penjelasan lebih lanjut dari kaidah ini bisa dilihat pada Abu Bakar b. Abu Qasim al-Ahdal, terjemah *Al-Farāid al-Bahiyah Risalah Qawāid Fiqh*, terj. Moh. Adib Bisri, (TK. : Menara Kudus, 1977), 72.

Shalat di belakang orang yang hadats yang tidak diketahui keadaannya, kalau kita menganggapnya sah, apakah sahnya itu karena shalat jama'ah ataukah karena shalat sendirian.<sup>1</sup>

Terdapat dua permasalahan terkait dengan kaidah ini, yaitu tentang *makmum* dalam shalat *fardlu* dan *makmum* dalam shalat jum'at, apabila imamnya ber-hadats besar. Untuk *makmum* dalam shalat *fardlu* terdapat dua pendapat. *Pertama*, shalat itu merupakan shalat jama'ah. *Kedua*, berpendapat bahwa shalat itu adalah shalat sendirian.

Kemudian untuk *makmum* dalam shalat jum'at, juga terdapat dua pendapat, sebagian menyatakan bahwa shalat *makmum* dalam shalat jum'at itu sah, dan sebagian yang lain menyatakan tidak sah.

### C. Kaidah Ketiga:

من أتى بما ينافي في الفرض دون النقل في أول فرض أو أثانته بطل فرضه وهل هي تبقى صلاته نفلاً أو تبطل؟

Orang yang melakukan hal-hal yang meniadakan *fardlu*-bukan *sunnah*- (seperti meninggalkan syarat atau rukun), baik pada permulaan *fardlu* atau ditengahnya, maka batallah *fardlunya*, tetapi apakah kemudian shalatnya menjadi *sunnah* ataukah batal sama sekali?<sup>2</sup>

Terdapat dua pendapat terkait dengan kaidah ini, *pertama*, menyatakan bahwa shalat *fardlunya* batal dan shalatnya menjadi *sunnah*, apabila seseorang yang melakukan shalat *fardlu* sendirian, kemudian ada shalat berjama'ah, dan karena ingin shalat berjama'ah ia salam setelah mendapatkan dua raka'at.

Pendapat *kedua* menyatakan bahwa shalatnya batal sama

1 Al-Suyūthī, *Al-Asybah*, 110., dan 'Abdullah ibn Sa'īd Muhammad 'Ubādi, *Idlāh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Surabaya: Maktabah Hidayah, t.t), 96.

2 Al-Suyūthī, *Al-Asybah*, 110.

sekali. Yaitu apabila seseorang telah melakukan *takbiratul ihram* untuk shalat *fardlu* sebelum masuknya waktu atau karena dia membatalkan *fardlu*-nya karena ditukarkan kepada *fardlu* yang lain.

### D. Kaidah Keempat:

النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائر

*Nadzar* itu apakah berlaku sebagaimana wajib, ataukah *jaiz*?<sup>1</sup>

Kaidah ini menyebabkan dua perbedaan pendapat, *pertama*, mengatakan bahwa *nadzar* itu berlaku sebagaimana wajib. Pendapat *kedua* mengatakan bahwa *nadzar* itu berlaku *sunnah*.

Mengenai niat puasa *nadzar*, juga terdapat dua pendapat. *Pertama*, mengatakan bahwa niat itu harus dilaksanakan pada malam hari sebagaimana puasa *fardlu*, *Kedua*, mengatakan boleh niat pada waktu pagi hari sebagaimana puasa *sunnah*.

### E. Kaidah Kelima:

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها

Apakah yang diperhitungkan itu lafadz akad, ataukah maknanya?<sup>2</sup>

Ada dua pendapat terkait dengan kaidah ini, *pertama*, mengatakan bahwa yang dihitung adalah lafadznya, dan yang *kedua*, berpendapat bahwa yang dihitung adalah maknanya. Misalnya, ada orang berkata: "Ini kamu aku beri uang, tetapi nanti kalau kamu pulang aku minta kamu berikan jam tangan". Menurut pendapat pertama ucapan semacam itu menjadi akad hibah, dan menurut pendapat kedua ucapan semacam itu menjadi akad *bay'*.

1 *Ibid.*

2 Al-Suyūthī, *al-Asybah*, 111., Ubadi, *Idlāh*, 98.

## F. Kaidah Keenam:

العين المستعارة للرهن هل المقلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية

Tentang barang pinjaman yang digadaikan, apakah yang dimenangkan segi tanggungan ataukah segi pinjaman?<sup>1</sup>

Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimenangkan adalah segi tanggungan, dan pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimenangkan adalah segi pinjaman. Contohnya, Ali meminjam sepeda motor kepada Burhan, dan secara terus terang Ali mengatakan kepada Burhan bahwa sepeda motor itu akan digadaikan. Setelah sepeda motor itu digadaikan, ternyata rumah gadai itu terbakar dan mobilnya ikut terbakar. Terdapat dua pendapat mengenai masalah ini, *pertama*, penggadai tidak wajib mengganti, begitu juga penerima gadai, *kedua*, penggadai sebagai peminjam dan yang menggadaikan itu wajib mengganti.

## G. Kaidah Ketujuh:

الحوالة هل هي بيع أو استيفاء

Akad *hiwâlah* itu apakah merupakan jual beli, ataukah sebagai pembayaran?<sup>2</sup>

Ada dua pendapat terkait dengan kaidah ini, *pertama* menyatakan bahwa akad *hiwâlah* itu merupakan akad jual beli, pendapat *kedua*, akad *hiwâlah* itu sebagai pembayaran.

Misalnya, Ali mempunyai tanggungan hutang kepada Burhan sebesar Rp.1.000.000,-. Kemudian Burhan mempunyai hutang kepada Anwar Rp.1.000.000,-. Jadi, Burhan selain ha-

rus membayar hutang kepada Anwar, dia juga akan mendapatkan pembayaran dari Ali. Untuk itu Burhan kemudian berkata kepada Ali: "uang yang aku hutangkan kepadamu, harap kamu bayarkan saja kepada Anwar, sebab aku mempunyai hutang kepada Anwar sebesar Rp.1.000.000,-. Dan kepada Anwar, Burhan berkata: "hutang saya Rp.1.000.000,- kepadamu nanti akan dibayarkan oleh Ali". Menurut pendapat *pertama*, akad *hiwâlah* semacam ini boleh *khiyâr*, sebab *hiwâlah* itu berarti jual beli, *kedua*, tidak boleh *khiyâr* sebab *hiwâlah* itu berarti pembayaran.

## H. Kaidah Kedelapan:

الإبراء هل هي إسقاط أو تملك

Apakah *ibra'* itu merupakan pengguguran ataukah memilikkan?<sup>1</sup>

Ada dua pendapat terkait dengan kaidah ini, pendapat *pertama*, menyatakan bahwa *ibra'* merupakan pengguguran, dan pendapat *kedua*, menyatakan bahwa *ibra'* adalah memilikkan. Misalnya, Ali meminjam uang kepada Burhan sebesar Rp. 100.000,-. Kemudian Burhan meng-*ibra'*-kan (membebaskan) hutang Ali kepadanya. Apakah Burhan boleh menarik kembali *ibra'*-nya kepada Ali, ataukah tidak. Menurut pendapat *pertama*, tidak boleh sebab *ibra'* berarti menggugurkan (*isqath*), dan menurut pendapat *kedua*, boleh karena *ibra'* sama dengan *tamlik*.

## Kaidah kesembilan:

الإقالة هل هي فسخ أو بيع

*Iqâlah* (pencabutan jual beli terhadap orang menyesal) itu, apakah merupakan *fasakh* (pembatalan jual beli), ataukah *bay'* (jual beli kembali)?<sup>2</sup>

1 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 113., Ubadi, *Idlâh*, 99.

2 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 114.

1 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 115., dan Ubadi, *Idlâh*, 101.

2 Al-Suyûthî, *al-Asybah*.



Menurut pendapat pertama *iqâlah* merupakan *fasakh*, sedangkan menurut pendapat kedua *iqâlah* adalah *bay'*. Contohnya, Ahmad (orang muslim) membeli budak (orang kafir) dari Salsa (orang kafir juga). Setelah selesai akad budak tersebut masuk Islam. Kemudian Ahmad menyatakan tidak jadi membeli (*iqâlah*). Jika ini berarti merusak akad (*fasakh*), maka *iqâlah* boleh, namun kalau dianggap sebagai penjualan kembali, maka *iqâlah* tidak boleh, sebab seorang muslim menjual budak muslim kepada orang kafir itu tidak diperbolehkan.

#### J. Kaidah Kesepuluh:

الصدّاق المعيّن في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد  
أَوْضمان يد

Mas kawin yang telah dinyatakan tetapi masih berada di tangan suami, belum diterimakan kepada isteri, apakah ditanggung dengan *dloman-akad*, ataukah *dloman-yad*?<sup>1</sup>

Pendapat pertama menyatakan ditanggung dengan *dlaman-akad*, dan pendapat kedua menyatakan ditanggung dengan *dlaman-yad*. Contohnya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan maskawin telah dinyatakan sebesar Rp. 100.000,-. Tetapi setelah satu tahun uang itu juga belum dikembalikan kepada isteri. Lalu siapakah yang harus mengeluarkan zakatnya, suami ataukah isteri?. Menurut pendapat pertama, isteri tidak wajib mengeluarkan zakat, dan pendapat kedua, isteri wajib mengeluarkan zakat.

#### K. Kaidah Kesebelas:

الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا

*Thalaaq raj'î* itu, apakah memutuskan nikah ataukah tidak? <sup>2</sup>

1 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 116.

2 Ibid.

Maksud dari kaidah ini, apabila seorang suami menggauli seorang istri pada masa *iddahnya*, kemudian baru merujuknya, maka wajib membayar mahar menurut pendapat yang menyatakan rujuk termasuk memutus pernikahan, dan kalau suami meninggal, istri tidak boleh memandikannya. Sedangkan menurut pendapat kedua istri boleh memandikannya apabila suaminya meninggal. Jadi apabila menganggap bahwa *thalak raj'î* itu dianggap putus, maka haram bagi keduanya bergaul, melihat aurat, dsb., dan apabila tidak dianggap putus, maka berakibat wajib memberikan nafkah, mempunyai hak waris, dsb.

#### L. Kaidah Keduabelas:

الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين

*Dhihar* itu apakah selayaknya serupa *thalaq*, ataukah serupa sumpah? <sup>1</sup>

Menurut kaidah ini, apabila *dhihar* itu diserupakan dengan *thalaq*, maka ia harus membayar empat *kaffarat*. Tetapi apabila diserupakan dengan sumpah maka ia cukup membayar satu *kaffarat*.

#### M. Kaidah Ketigabelas:

فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أم لا

*Fardlu kifayah* yang sudah dikerjakan itu apakah menjadi *fardlu 'ain* atau tidak? <sup>2</sup>

Menurut pendapat yang lebih sah, apabila seseorang sedang shalat jenazah, maka ia tidak boleh meninggalkan shalat itu, karena hal itu *fardlu 'ain*, demikian pula kasus jihad, apabila seseorang sedang berjihad diharamkan meninggalkannya.

1 Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 212, lihat pula pada Ubadi, *Idlah*, 106.

2 Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 117., bisa juga dilihat pada Ubadi, *Idlah*, 107.

Menurut al-Ghazālī, pendapat di atas hanya berlaku pada shalat jenazah dan jihad saja, untuk yang lain hukumnya tetap fardlu kifayah.

#### N. Kaidah Keempatbelas:

الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد

Sesuatu yang telah bergeser tetapi kembali lagi, apakah seperti yang tidak bergeser, ataukah bagaikan yang tidak kembali?<sup>1</sup>

Ada dua pendapat berkaitan dengan kaidah di atas, yaitu:

- a. Dianggap seperti semula, misalnya wanita yang telah ditalak sebelum digauli, maka hilang kemilikannya atas mahar, kalau suaminya kembali maka kembali pula hak pemilikan-nya terhadap mahar seperti mahar semula. Contoh lain, seseorang yang kehilangan harta yang telah wajib zakat, kemudian harta yang hilang itu kembali lagi maka pada akhir tahun tetap wajib membayar zakat.
- b. Dianggap seperti barang baru, misalnya hakim gila atau hilang keahliannya, kemudian sembuh atau kembali keahliannya maka tidak kembali kekuasaan hakimnya<sup>2</sup>.

#### O. Kaidah Kelimabelas:

هل العبرة بالحال أو بالمال

Apakah ungkapan itu menurut keadaan atau menurut bendanya?<sup>3</sup>

Contoh dari kaidah ini, apabila seseorang menjadi imam dengan pakaian yang menutup aurat, kemudian ditengah-tengah shalat pakaiannya robek. menurut pendapat yang kuat, apa

1 Ibid., 118.

2 Usman, *Kaidah-kaidah*, 214., bisa juga dilihat pada Ubadi, *Īdāh*, 108-109.

3 Al-Suyūthī, *al-Asybah*, 119.

yang akan terjadi tidak dijadikan seperti apa yang terjadi, jadi makmum tetap sah dengan niat *infirād* (memisahkan diri dari shalat berjamaah) ketika robek pakaian imam.

#### P. Kaidah Keenambelas:

إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟

Manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap, ataukah ikut batal?<sup>1</sup>

Misalnya, seseorang yang telah melakukan *takbiratul ihram* pada shalat yang belum masuk pada waktunya, maka batallah kekhususannya (niat shalat wajib itu), tetapi menurut pendapat yang absah, masih berlaku keumuman takbir itu sampai selesai shalat sunnat. Demikian juga orang yang bertayamum untuk shalat wajib sebelum masuk pada waktunya, maka batal tayamumnya untuk shalat wajib, serta tidak boleh digunakan untuk shalat sunnat. Kecuali jika niatnya untuk tayamum shalat sunnat maka hal demikian diperbolehkan.

#### Q. Kaidah Ketujuhbelas:

الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟

Kandungan itu, apakah diberi hukum *ma'lūm*, ataukah *majhūl*?<sup>2</sup>

Menurut kaidah ini, menjual binatang yang sedang bunting beserta anak yang masih dalam perut induk ibunya adalah tidak boleh (menurut pendapat yang paling sah). Karena yang ada dalam kandungan itu masih *majhūl* belum diketahui kriterianya. Sedangkan memberikan wasiat terhadap anak yang masih ada dalam kandungan adalah diperbolehkan karena sudah jelas. Tetapi dalam hal waris, anak yang ada dalam kand-

1 Ibid., 121.

2 Ibid.

ungan dihukumi sebagai anak laki-laki, sebab apabila ia lahir laki-laki, maka ia akan menerima sebagaimana mestinya, tetapi jika ia lahir perempuan maka kelebihan hartanya bisa dibagikan pada yang lain. Jika anak yang dalam kandungan itu dianggap perempuan, maka akan kesulitan apabila anak itu ternyata lahir laki-laki.

#### R. Kaidah Kedelapanbelas:

النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟

Sesuatu yang nadir (jarang terjadi) itu, apakah disamakan dengan jenisnya, ataukah dengan bendanya itu sendiri?.<sup>1</sup>

Menurut kaidah ini, apabila karena suatu kecelakaan, seorang perempuan putus tangannya, kemudian ada laki-laki lain memegang tangan (yang telah terpisah dari tubuh wanita) itu apakah wudlunya menjadi batal, ataukah tidak?. Menurut pendapat pertama itu membatalkan wudlu, karena tangan yang sudah terputus dari tubuh perempuan itu, kalau dipandang dari segi najis, termasuk jenis tangan perempuan. Sedangkan menurut pendapat kedua tidak membatalkan wudlu, karena kalau dilihat dari segi keadaan bendanya itu sendiri, tidak lebih dari sepotong daging.

#### S. Kaidah Kesembilanbelas:

القادر على اليقين هل له الإجتهد والأخذ بالظن؟

Orang yang bisa yakin apakah baginya boleh *ijtihād* dan mengambil perkara yang kuat?.<sup>2</sup>

Secara umum seseorang mujtahid tidak boleh berijtihad jika mendapatkan *nash*, karena *nash* merupakan suatu keyaki-

nan dan dia tidak boleh mengabaikan *nash* tersebut, sedangkan *ijtihād* merupakan keputusan *dhan* dibanding dengan *nash*. Misalnya, seseorang yang mempunyai dua baju, yang satu suci sedangkan yang lainnya adalah najis. Maka ia boleh berijtihad menentukan mana yang suci untuk dipergunakan walaupun ia dapat berganti pakaian yang jelas suci. Namun seseorang tidak diperbolehkan menghadap Hijr Isma'il, karena yang yakin jelas diketahuhi, yakni menghadap Ka'bah.

Contoh lain, seseorang memiliki dua lembar sarung, yang satu kena najis dan yang lain tidak, tetapi karena najisnya sudah kering maka ia tidak dapat membedakan dan menentukan dengan pasti, manakah di antara kedua sarung itu yang terkena najis, sementara itu, masih ada selemba sarung lagi yang jelas suci yang berada di lemari. Ketika ia akan shalat bolehkah ia *ijtihād* meneliti dua lembar sarung yang masih diragukan itu, mana yang suci diantara keduanya, ataukah dua-duanya ditinggalkan dan menggunakan sarung ketiga (yang masih dalam almari) yang jelas suci?

Menurut pendapat pertama, boleh *ijtihād*, sedangkan menurut pendapat kedua tidak boleh *ijtihād*. Pendapat yang disepakati dari kedua pendapat tersebut:

- Boleh *ijtihād*, misalnya: seseorang mempunyai dua gelas susu, yang segelas suci dan yang lain terkena najis. Di samping itu, dalam almari ada segelas lagi yang jelas suci, menurut hukum, ia boleh *ijtihād*.
- Tidak boleh *ijtihād*, orang yang berada di Makkah, ketika akan shalat tidak boleh *ijtihād* lagi, karena ka'bah yang menjadi kiblat shalat ada dihadapannya.<sup>1</sup>

1 Ibid, 122.

2 Ibid, 123.

1 Musbikin, *Qawā'id*, 202.



## T. Kaidah Keduapuluh:

المانع الطرى هل هو كالمقارن؟

Halangan yang datang kemudian itu, apakah ia seperti yang membarengi/bercampur?<sup>1</sup>

Ada dua pendapat berkaitan dengan kaidah di atas, pertama, menganggap seperti bercampunya murtad seseorang yang sedang *ihram*, adanya air di tengah-tengah orang yang shalat (karena bertayamum), serta perubahan niat yang buruk yang semula baik dalam bepergian, maka hukumnya kasus seperti itu, *ihram*-nya menjadi batal, shalatnya juga menjadi batal, dan tidak ada *rukhsah* baginya. Kedua, menganggap tidak seperti bercampur, maka semua amal di atas tidak batal dan untuk yang bepergian diperbolehkan *rukhsah*.

Dari beberapa kaidah di atas, dapat diamati bahwa kaidah yang diperselisihkan sebenarnya bukan pada kaidah itu sendiri tetapi lebih mengarah pada kondisi yang mempengaruhi kaidah itu tercipta, sehingga keberlakuan kaidah tersebut menurut kondisi yang melatarbelakanginya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asmuni. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Awdah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyrî' al-Jinây al-Islâmî Muqâran bi al-Qânûn al-Wadl'i*. Cairo: Dâr Nasyr al-Tsaqafah, vol. I, 1949.
- Al-Ahdal, Abu Bakr bin Abu Qasim, Terjemah *al-Farâ'idul Ba-hiyyah Risalah Qawâ'id Fiqh*. Terj. Moh. Adib Bisri. Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabâdî Awwaliyah*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Ku-waytiyah, 1968.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Asasi Kaidah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mujib, Abdul. *Al-Qawâ'id Fiqhiyah*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

1 Al-Suyuthi, al-Asybah, 123.



- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Nawāwī, Imām Abū Zakariya Yahyā ibn Syaraf. *Riyadlu al-Shālihīn*, terj. Salim Bahreisy. Bandung: Al-Ma'arif, jilid I, 1989.
- Ridwan, Fatihi. *Min al-Falsafah al-Tasyrī' al-Islām*. T.tp: Dār al-Kâtib al-'Arabī, , 1969.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, Jilid I, 1994.
- Al-Suyūthī, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān. *Al-Jāmi' al-Saghīr*. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabī, vol. II, Cairo, 1954.
- \_\_\_\_\_, *Al-Asybah wa al-Nadhāir*. Indonesia, Syirkah Nur Asia tt.
- Al-Syāfi'ī, Ahmad Muhammad. *Ushul Fiqh al-Islāmī*. T.tp.: Iskandariah Mu'assasat Tsaqafat al-Jāmi'iyah, 1983.
- Tim Depag. RI. *Ushul Fiqh I dan II*. Jakarta: P3SPTU, 1986.
- 'Ubādī, al-Syaykh 'Abdullah ibn Sa'īd Muhammad. *Īdlāh al-Qāwā'id al-Fiqhiyah*. Surabaya: Maktabah Hidayah, t.t.
- Usman, Muhlish. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Nadriyat al-Dinuriyah al-Syarī'ah*. Beirut: Muassasah Risālah 1982.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Hajimasingung, II, 1990.